



PEMERINTAH KABUPATEN
TAPANULI TENGAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Tapanuli Tengah

P-RKPD TAHUN 2024





BUPATI TAPANULI TENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR : 15 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu dilakukan perubahan terhadap rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-6889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

- Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 36);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 Nomor 2);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013 Nomor 8);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 Nomor 4);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 Nomor 1);
 22. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kabupaten Tapanuli Tengah (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022 Nomor 14);
 23. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun;
8. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat P-RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) Tahun;
10. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat P-APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat P-KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat P-PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

P-RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan maksud untuk menyesuaikan:

- (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

BAB III

PENETAPAN DAN SISTEMATIKA P-RKPD TAHUN 2024

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan P-RKPD Tahun 2024.
- (2) P-RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen perencanaan daerah tahun berjalan, yaitu tahun 2024 yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 4

P-RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan P-KUA, P-PPAS dan Rancangan P-APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

Sistematika P-RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan II (dua) Tahun 2024;
- Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
- Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- Bab VI Penutup.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen P-RKPD Tahun Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 9 Agustus 2024

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH,


SUGENG RIYANTA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada Pasal 343 menyatakan perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pembangunan Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menyusun Perubahan RKPD (P-RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 yang akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah NO. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
14. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 183);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik 7 Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 Nomor 2);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 Nomor 4);
 23. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026.
 24. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 merupakan Dokumen perencanaan yang dimaksudkan untuk memberi arah bagi semua pemangku kepentingan dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi pembangunan tahun 2024.

Tujuan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 adalah menjadi acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rancangan Akhir

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, serta menjadi dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024 serta Perubahan R-APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024.

1.4 Sistematika Dokumen

Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN RKPD TW II TAHUN 2024

Bab ini menguraikan evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 hingga Triwulan II serta permasalahan pembangunan daerah yang masih dihadapi.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan rancangan ekonomi dan keuangan daerah yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro triwulan pertama tahun 2024 dan proyeksi tahun 2024, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan pada tahun 2024.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuatsasaran dan prioritas pembangunan daerah yaitu penjabaran tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat baik mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan.

BAB VI PENUTUP

Memuat kesimpulan dan penegasan bahwa diperlukan sinergitas bagi Pemerintah Daerah dan semua pihak terkait dalam pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Makro Hingga Triwulan II Tahun 2024

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merefleksikan peningkatan produksi seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin bergairahnya kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, yang pada hakekatnya meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku berdasarkan lapangan usaha menunjukkan tren pertumbuhan positif meskipun tidak signifikan. Penyumbang laju pertumbuhan ekonomi masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 46,80 persen, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, industri pengolahan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sektor – sektor tersebut memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli tengah.

Tabel 2.1

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2019 – 2023 (dalam persen)**

No	Lapangan Usaha	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	45,32	46,18	46,20	46,76	46,80
2	Pertambangan dan Penggalian	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
3	Industri Pengolahan	11,32	11,18	11,61	11,60	11,25
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,57	0,57	0,56	0,56	0,53
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
6	Konstruksi	11,98	11,55	11,74	11,70	12,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,34	12,29	12,50	12,57	12,55
8	Transportasi dan Pergudangan	2,78	2,56	2,18	2,41	2,74
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,48	1,37	1,33	1,33	1,32
10	Informasi dan Komunikasi	0,61	0,64	0,67	0,66	0,65

No	Lapangan Usaha	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,97	0,98	1,03	0,99	0,96
12	Real Estate	2,03	2,06	2,03	1,98	1,94
13	Jasa Perusahaan	0,32	0,33	0,33	0,33	0,34
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,47	8,50	8,06	7,36	7,20
15	Jasa Pendidikan	0,99	0,98	0,98	0,95	0,93
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,34	0,35	0,33	0,33	0,33
17	Jasa lainnya	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		5,18	-0,76	2,56	4,18	4,23

Ket: *angkasementara, **angkasangatsementara

Sumber: BPS Kab Tapanuli Tengah, Tapanuli Tengah Dalam Angka, 2024

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2020 berkontraksi sebesar 0,76 persen disebabkan oleh Pandemi COVID-19. Namun seiring penanganan dan pemulihan ekonomi daerah hingga pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi meningkat hingga mencapai 4,23 persen. Diharapkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi normal kembali seperti kondisi sebelum pandemic, maka dinas/OPD memacu kegiatan sektoralnya untuk mendukung pemulihan ekonomi, dan mendorong peran pelaku usaha untuk memulihkan kegiatan ekonomi dengan menggerakkan sektor produktif.

b. PDRB perkapita

Pendapatan perkapita menunjukkan besarnya pendapatan yang diperoleh setiap penduduk secara rata-rata. Nilai pendapatan perkapita dapat dilihat melalui proxy menggunakan indikator PDRB per Kapita dimana indikator ini didapatkan dari nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. Angka PDRB per Kapita tersebut secara makro digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan penduduk. Terlihat bahwa angka PDRB per Kapita Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami kenaikan secara periodik dengan capaian sebesar 32.649 ribu rupiah pada tahun 2023. Data PDRB perkapita Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
PDRB Perkapita Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB per Kapita per Tahun (ribu rupiah)					
ADHB	26.119	27.868	28.754	31.049	32.649

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kesejahteraan sosial. Indeks ini terdiri dari tiga dimensi yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi pengeluaran. Metode perhitungan IPM diadaptasi dari metode perhitungan *Human Development Indeks* (HDI) oleh *United Nation Development Program* (UNDP). Berikut adalah Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah disertai dengan komponen pembentuknya. Indikator pendukung indeks pembangunan manusia juga terus mengalami peningkatan positif dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3

Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Usia Harapan Hidup	67,08	67,15	71,16	71,47	71,76
Harapan Lama Sekolah	12,79	13,06	13,07	13,24	13,49
Rata-rata Lama Sekolah	8,48	8,62	8,84	8,86	8,87
Pengeluaran per kapita	10.175	10.071	10.138	10.495	10.690
Indeks Pembangunan Manusia	68,86	69,23	71,48	72,18	72,77

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM merupakan data strategis bagi ukuran kinerja pemerintah. Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,77.

d. Penduduk Miskin

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Gambaran kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Penduduk Miskin (%)	12,53	12,38	12,67	11,71	11,50
2	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	46,99	47,19	49,95	47,07	47,09
3	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	376.474	406.646	429.050	450.940	489.760

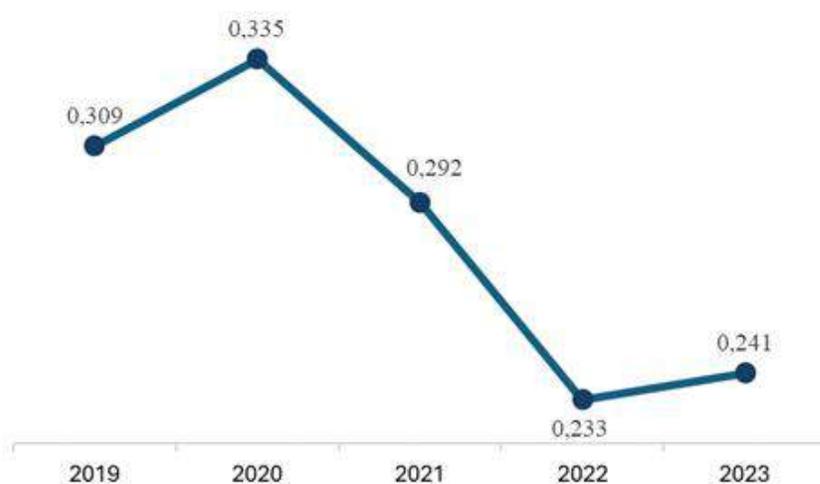
Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa selama periode tahun 2019 hingga tahun 2023, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tapanuli Tengah cenderung menurun di mana pada tahun 2019 sebesar 12,53 persen dan menurun hingga mencapai 11,50 persen pada tahun 2023.

e. Gini Rasio

Gini Rasio adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Distribusi pendapatan semakin merata ketika koefisien rasio gini antara 0,20 s/d 0,35 dan sebaliknya distribusi pendapatan dikatakan sangat timpang antara 0,50 s/d 0,70. Tingkat ketimpangan penduduk Kabupaten tapanuli Tengah 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif. Pada tahun 2022 menunjukkan tren positif dimana ketimpangan pendapatan mengalami penurunan signifikan sebesar 0.233 dari 0,335 pada tahun 2020 setelah pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan yakni sebesar 0,241 meningkat 0,008 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar 2.1
Gini Rasio Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2019 - 2023



Sumber data : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Penurunan indeks Gini rasio disebabkan oleh beberapa faktor salah satu faktor utamanya adalah membaiknya kinerja aktivitas ekonomi diberbagai sektor lapangan usaha yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah.

f. Inflasi

Pada Secara umum laju inflasi merupakan persentase kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu priode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju inflasi adalah permintaan dan penawaran barang, biaya produksi, kebijakan moneter, dan perubahan nilai tukar mata uang. Pendekatan laju inflasi Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan laju inflasi di Kota Sibolga. Pada kurun waktu 2019-2023 secara umum laju inflasi Kota Sibolga mengalami penurunan. Meskipun terjadi kenaikan signifikan pada tahun 2022 sebesar 6,43 persen, namun pada 2023 pemerintahan berhasil menekan laju inflasi menjadi 2,80 persen. Kenaikan laju inflasi tentu akan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Kebutuhan bahan makanan menjadi penyumbang terbesar mempengaruhi tingkat laju inflasi di kota sibolga dan sekitarnya.

Laju inflasi Kota Sibolga bila dilihat rata-rata diatas laju inflasi Provinsi dan Nasional. Peningkatan inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi internal saja, tetapi juga Nasional dan global.

g. Tingkat Pengangguran Terbuka

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, indikator ketenagakerjaan digunakan sebagai salah satu indikator untuk menggambarkan kesejahteraan sosial. Indikator ketenagakerjaan tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

TPAK mengidentifikasi besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK mencerminkan penyediaan tenaga kerja atau jumlah angkatan kerja. TPAK merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja dalam kelompok yang sama. Semakin besar TPAK, semakin besar jumlah angkatan kerja dalam kelompok yang sama. Sebaliknya, semakin besar jumlah penduduk yang masih bersekolah dan mengurus rumah tangga, semakin besar jumlah yang tergolong bukan angkatan kerja, semakin kecil jumlah angkatan kerja, akan berakibat semakin kecil TPAK.

TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Perkembangan angkatan kerja dan TPAK di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2019-2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.5
TPAK dan Kesempatan Kerja di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2023

INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023
1	Angkatan Kerja	171.470	185.218	201.096	210.141	211.032
	A. Bekerja	159.023	171.250	186.530	193.387	194.545
	B. Pengangguran	12.447	13.968	14.566	16.754	16.487
2	Bukan Angkatan Kerja	68.384	75.984	66.859	64.531	72.159
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,67	70,91	75,05	76,51	74,52
	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,29	7,54	7,24	7,97	7,81

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024, data diolah

Pada table di atas ditampilkan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mulai tahun 2019-2023. Jika boleh dikatakan bahwa semakin tinggi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) maka semakin tinggi penduduk usia 15 tahun ke atas atau pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dan semakin tinggi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) maka semakin tinggi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai pekerjaan dan yang sedang mencari pekerjaan.

2.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Hingga Triwulan II Tahun 2024

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Tengah antara lain dapat dilihat melalui pengukuran pencapaian kinerja pembangunan atas Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka panjang daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Implementasi dari IKU di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk keperluan penilaian LAKIP/SAKIP. Adapun Realisasi Target Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024

No.	Indikator	Sat	Tahun 2022	Capaian	
				Tahun 2023	Tahun 2024 (Triwulan II)
1	Indeks Pembangunan Manusia	-	72,18	72,77	72,77 (kondisi 2023)
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,18	4,23	4,23 (kondisi 2023)
3	PDRB per Kapita (Harga Berlaku)		31.049	32.649	32.649 (kondisi 2023)
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	68,41	68,41
5	Indeks Infrastruktur	-	-	8,19	8,19 (kondisi 2023)
6	Tingkat Kemiskinan	%	11,71	11,50	11,50 (kondisi 2023)
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,97	7,81	7,81 (kondisi 2023)
8	Indeks Gini	-	0,233	0,241	0,241 (kondisi 2023)
9	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	38,54	38,54
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-		51,75

2.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Hingga Triwulan II Tahun 2024

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja kunci daerah beserta targetnya hingga triwulan II Tahun 2024 dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7
Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Realisasi		Target	Target
				2023	Tw. II 2024	2024	P-RKPD 2024
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
I.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1	Indeks Pembangunan Manusia	-	72,18	72,77	72,77	72,77-73	72,78-73,22
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,18	4,23	4,23	4,23-5,25	3,25-5,25
3	PDRB per Kapita	Ribu rupiah	31.049	32,649	32,649(Kondisi Tahun 2023)	32,96	32,649 (Kondisi Tahun 2023)
4	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	3,21	3,21	3,21	3,04	2,44
5	LPE kategori industri pengolahan	%	1,87	1,87	1,87	4,565	4,565
6	LPE Sektor Pariwisata (Akomodasi dan makan minum)	%	7,704	7,85	7,85	8,00	5,32
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	74,04	68,41	68,41	68,49	68,41
8	Indeks Risiko Bencana	-	191,2	187,85	187,85	180,40	187,85
9	Indeks Infrastruktur	-	60	31,98	32,83	33,68	
10	Tingkat Kemiskinan	%	11,71	11,50	11,50	10,67-11,50	11,50
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,97	7,81	7,81	6,50	7,81
12	Indeks Pengeluaran	-	Na		Na	0,712	Na
13	Indeks Gini	-	0,233	0,241	0,241	0,220	0,214
14	Indeks Reformasi Birokrasi	-	45,90	38,54 (C)	38,54 (C)	54,33 (CC)	60
15	Nilai SAKIP	-	38,77 (C)	40,19	40,19	79,00 (B)	79
16	Indeks MCP (Monitoring Center for Prevention)	-	80	51,08	51,08	86,2	51,08
17	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		54,2804	72,691 (B)	72,691 (2023)	73,190 (B)	73,190
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	51,75		51,75 (Kondisi Tahun 2022)	60,00 (C)	51,75 (Kondisi Tahun 2022)
19	Laju Inflasi (Kota Sibolga)	%	6,43%	3,75	3,75	2,4	3,75
20	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Juta Ton CO2eq	-			2,75	Bukan indikator kinerja DLH
21	Prevalensi stunting	%	30,5	23,8	23,8	14,0	23,8
II. Kesejahteraan Sosial							
1	Indeks Pendidikan	-	0,728	0,69	0,69	0,731	0,69
2	Indeks Kesehatan	-	0,732	0,732	0,732	0,681	0,732

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Realisasi	Realisasi	Target	Target
				2023	Tw. II 2024	2024	P-RKPD 2024
ASPEK PELAYANAN UMUM							
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar							
a) Pendidikan							
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	69,35	63,56%	63,56%	75%	63,56%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	98,73%	99,98%	99,98%	99,99%	99,98%
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	91,82%	99,10%	99,10%	99,33%	99,10%
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	4,52%	0,79%	0,79%	85,53%	0,79%
b) Kesehatan							
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	%	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	80	86	21	50,00%	21
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	78	87	21,27	92,00%	21,27
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	80	92	22,41	86,00%	22,41
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	70	62	23,28	88,00%	23,28
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	81	38	0	89,00%	0
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	79	46	20,91	81,00%	20,91
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	85	88	22,93	79,00%	22,93
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	28	35	4,78	98,40%	4,78
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	82	95	18,28	22,00%	18,28
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	35	44	47,39	57,00%	47,39
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	49	61	8,03	47,00%	8,03
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	28	35	7,8	29,00%	7,8
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	16%	16%	16%	20,00%	16%
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	72.54%	73.54%	73,54%	66,23%	73,54%
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap	%	60.55%	61.78%	61,78%	66,27%	61,78%

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Realisasi	Realisasi	Target	Target
				2023	Tw. II 2024	2024	P-RKPD 2024
	rumah tangga di seluruh kabupaten / kota						
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	43.48%	43.75%	43,75%	98,16%	43,75%
5	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100%	100%	100%	87,84%	100%
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	63.43%	59.72%	59,72%	63,25%	59,72%
7	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100%	100%	100%	100,00%	100%
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100%	100%	100%	100,00%	100%
d) Perumahan Rakyat							
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	%	100,00 %	0%	0%	100,00%	0%
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	%	0 %	0%	0%	100,00%	0%
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	0 %	28,59%	0%	76,78%	0%
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	16,80 %	16,65%	0%	4,50%	0%
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	0 %	0,430%	0%	7,44%	0%
e) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %
2	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	80,00%	75,00 %	75,00 %	82,50%	75,00 %
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	100,00%	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
f) Sosial							
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar							
a) Tenaga Kerja							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	40,12%	26,32%	29,52%	52,65%	29,52%
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0%	0,50%	0,15%	0,70%	0,15%
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	53,7%	27'52%	27'80%	47,92%	27'80%
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	1,1%	2,2%	2,2%	3,3%	2,2%
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	%	19,19%	2,8%	3,15%	6,67%	3,15%

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Realisasi	Realisasi	Target	Target
				2023	Tw. II 2024	2024	P-RKPD 2024
b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	21,16%	11%	33,44%	10,78%	33,44%
2	Rasio anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (per 100.000 penduduk anak)	Angka	27,44%	59,09	12,31	18,78	12,31
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO yang ditangani instansi terkait kabupaten (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	7,9%	4,92	1,09	16,61	1,09
d) Pertanian							
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	0 %	0 %	0 %	100,00%	0 %
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	0 %	0 %	0 %	0%	0 %
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	0 %	0 %	0 %	0%	0 %
4	Tersedianya Tanali Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	19,07 %	4,00 %	0 %	TIDAK ADA	0 %
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	0 %	0 %	0 %	100,00%	0 %
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	33,33 %	50 %	0 %	100,00%	0 %
e) Lingkungan Hidup							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	%	68	68,41	68,41	74,12	68,41
f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	perekaman KTP elektronik	%	87,39%	91,46%	Data konsolidasi	100,00%	Data konsolidasi
2	persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	23,09%	30,45%	Belum diterbitkan dirjen	43,00%	Belum diterbitkan dirjen
3	kepemilikan akta kelahiran	%	46,49%	49,04%	Dukcapil kemedagri	99,00%	Dukcapilk emedagri
4	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama	%	15,15%	15,15%	21,21%	32,97%	21,21%
g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Persentase Pengentasan Desa sangat tertinggal dan tertinggal	%	61,63%	57,86%	46,54%	53,45%	46,54%
2	Persentase peningkatan satatus desa berkembang dan maju serta mandiri	%	38,37%	42,14%	53,45%	46,55%	53,45%
h) Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana							
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,0%	2,74	Belum ada Data	2,11%	Belum ada Data
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	%	43,42%	58,18%	59,86%	74,05%	59,86%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	33,95%	14,40%	Belum ada Data	16,80%	Belum ada Data%
i) Perhubungan							
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	%	54%	56%	56%	64%	56%
2	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	%	45%	46%	46%	49%	46%
j) Komunikasi dan Informatika							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung	%	6%	6,25	6,25	24,00%	6,25

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Realisasi	Realisasi	Target	Target
				2023	Tw. II 2024	2024	P-RKPD 2024
	dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo						
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100%	33,33	33,33	97%	33,33
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	46%	54,00	33,00	59%	33,00
k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	100%	50,4%	10%	17,50%	10%
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasusaha	%	100%	65%	70%	100,00%	70%
l) Penanaman Modal							
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	255,11%	148,53%	25,27%	17%	25,27%
m) Kepemudaan dan Olahraga							
1	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	2 Event	-	3	2 Medali	3
n) Statistik							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100%	100	100	100,00%	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	90%	100	70	96,00%	70
o) Persandian							
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100%	45	55	17,50%	55
p) Kebudayaan							
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100%	0%	100,00%	0%
q) Perpustakaan							
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	%	na	-	0	44%	0
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	na	-	10%	31,50	10%
r) Kearsipan							
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	na	-	1,0%	3,75%	1,0%
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	na	-	0	1,46%	0
Urusan Pilihan							
a) Kelautan dan Perikanan							
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	42.313,00 Ton	42.307	18,546 Ton	1.300,00 Ton	18,546 Ton
b) Pariwisata							
1	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	orang	11	40		50	
c) Pertanian							
1	Persentase peningkatan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	14,95	7,24%	1,96	2,35	1,96

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Realisasi	Realisasi	Target	Target
				2023	Tw. II 2024	2024	P-RKPD 2024
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-0.88%	-100%	250%	100,00%	250%
d) Kehutanan							
e) Energi dan Sumber Daya Mineral							
f) Perdagangan							
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	1,47%	0	0	0,83%	0
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	45,28%	81%	30%	100,00%	30%
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	34,03%	45,81%	9%	19,76%	9%
g) Perindustrian							
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	%	3,68%	3,13%	1,3%	11,66%	1,3%
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	37,5%	37,5%	37,5%	45,0%	37,5%
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	7,14%	100%	0%	100,00%	0%
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0%	0%	0%	76,0%	0%
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota	%	0%	0%	0%	100,00%	0%
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100%	1,3%	98,00%	1,3%
h) Transmigrasi							
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							
a) Perencanaan dan Keuangan							
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	11%	13%	26%	14,15%	26%
2	Rasio PAD	%	6%	7%	9%	10,25%	9%
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	Level 2	Level 2,7	-	Level 3	-
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-	Level 2	Level 1	-	Level 3	-
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi <i>transfer expenditures</i>)	%	20%	83%	93%	30%	93%
6	Opini Laporan Keuangan	-	WTP	WDP	-	WTP	-
b) Pengadaan							
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0,00	0	0	50%	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	37,47	61,00	26,25%	52,5%	26,25%
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	27,74	27,74	18,25%	36,50%	18,25%

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Realisasi	Realisasi	Target	Target
				2023	Tw. II 2024	2024	P-RKPD 2024
c) Kepegawaian							
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	271%	75%	77%	446%	77%
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	68%	12%	13%	63%	13%
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	1,85%	10,17	9%	1,75%	9%
d) Manajemen Keuangan							
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	4%	6%	18%	11,5%	18%
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	23%	14%	29%	27%	29%
3	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	3%	6%	8%	6,25%	8%
e) Transparansi dan Partisipasi Publik							
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
I. Kemampuan Ekonomi Daerah							
1 Pangan							
01.01	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	605.190		803	1.000.000	803
01.02	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	Rp	112.757		195	415.000	195
2 Pertanian							
02.01	Nilai Tukar Petani (Pendekatan angka Provinsi)	-	121,73	127,81	132,12	100,00	132,12
II Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
1 ESDM							
01.01	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	59,62	N/A	N/A	88,10	N/A
01.02	Persentase penduduk yang mengakses internet	%	NA	N/A	N/A	63,15	N/A
III Iklim Berinvestasi							
1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat							
01.01	Angka kriminalitas (crime rate)	%	NIHIL		0	47,50	0
2 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
02.01	Nilai Indeks Desa Membangun	-	0,5736 (Tertinggal)	0,5842 (Tertinggal)	0,5345 (Tertinggal)	0,5894 (Tertinggal)	0,5345 (Tertinggal)
IV Sumber Daya Manusia							
1 Ketenagakerjaan							
01.02	Persentase penduduk berpendidikan tinggi	%	8,66%	11,33%	11,06%	10,50	11,06%

Berdasarkan hasil evaluasi hasil RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Triwulan II Tahun 2024 dari seluruh indikator kinerja daerah dapat dilihat bahwa capaian kinerja tersebut masih ada yang memerlukan *effort* lebih tinggi, sehingga diharapkan pada akhir periode dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 306 ayat (5) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Bupati/ walikota menyampaikan laporan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi. Formulir Evaluasi terhadap hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran dokumen ini.

2.4 Rekapitulasi rata-rata Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi hasil RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Triwulan II Tahun 2024 dari seluruh program/ kegiatan per OPD dapat dilihat capaian kinerja dan kegiatan beserta predikat kinerja dari masing-masing OPD. Rata-rata persentase capaian kinerja program akan dinilai berdasarkan kriteria pada Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berikut disajikan rekapitulasi data dimaksud.

Tabel 2.8
Realisasi Capaian Kinerja dan Predikat Kinerja
OPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Hingga Triwulan II Tahun 2024

NO.	URUSAN	CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT KINERJA
I. Wajib Pelayanan Dasar			
1.	Pendidikan Kesehatan	6%	Sangat Rendah
2.	Dinas Kesehatan	9%	Sangat Rendah
	RSUD Pandan	44%	Sangat Rendah
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12%	Sangat Rendah
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	46%	Sangat Rendah
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
5.	Satpol PP	45%	Sangat Rendah
	BPBD	45%	Sangat Rendah
II. Wajib Non Pelayanan Dasar			
6.	Sosial	19%	Sangat Rendah
7.	Tenaga Kerja	40%	Sangat Rendah
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24%	Sangat Rendah
9.	Pangan	-	Sangat Rendah
10.	Lingkungan Hidup	17%	Sangat Rendah
11.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18%	Sangat Rendah
12.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	16%	Sangat Rendah
13.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	21%	Sangat Rendah
14.	Perhubungan	39%	Sangat Rendah
15.	Komunikasi dan Informatika	48%	Sangat Rendah
16.	Koperasi dan UKM	36%	Sangat Rendah
17.	Penanaman Modal	21%	Sangat Rendah

NO.	URUSAN	CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT KINERJA
18.	Kepemudaan dan Olahraga	35%	Sangat Rendah
19.	Perpustakaan	56%	Rendah
III. Pilihan			
20.	Kelautan dan Perikanan	43%	Sangat Rendah
21.	Pariwisata	61%	Rendah
22.	Pertanian	35%	Sangat Rendah
23.	Perindustrian dan Perdagangan	16%	Sangat Rendah
IV. Fungsi Penunjang			
Administrasi Pemerintahan			
24.	Sekretariat Daerah Kabupaten	39%	Sangat Rendah
	Sekretariat Dewan	19%	Sangat Rendah
25.	Pengawasan	27%	Sangat Rendah
26.	Perencanaan	42%	Sangat Rendah
27.	Pengelolaan Keuangan	43%	Sangat Rendah
28.	Kepegawaian	41%	Sangat Rendah
V. Urusan Pendukung			
29.	Kesbangpol	5%	Sangat Rendah
Hasil			
30.	Rata-rata Capaian Kinerja	31%	Sangat Rendah

Hasil evaluasi RKPD Tahun 2024 mempunyai total rata-rata capaian kinerja dan anggaran sebesar 31% dengan predikat Sangat Rendah. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi persyaratan pencapaian kinerja yang diharapkan dikarenakan masih banyak kegiatan yang belum bisa dilaksanakan di triwulan pertama dan triwulan kedua.

Dalam pencapaian kinerja terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala yaitu:

1. Penyesuaian indikator yang berubah;
2. Penggunaan dana untuk membiayai tenaga PPPK;
3. Penyampaian laporan evaluasi renja dari perangkat daerah yang tidak tepat waktu;
4. Keterbatasan sumberdaya berupa sarana dan prasarana yang mendukung kinerja perangkat daerah;
5. Masih relatif rendahnya capaian beberapa indikator makro jika dibandingkan dengan kabupaten/ kota tetangga dan provinsi Sumatera Utara.

Dari hasil evaluasi kinerja, realisasi anggaran, pendapatan, belanja, pembiayaan serta permasalahan terdapat hal yang mendasar untuk menyesuaikan perubahan pada tahun 2024 seperti:

1. Penganggaran Target Pendapatan;
2. Pergeseran anggaran pendapatan;
3. Pergeseran Anggaran Dari Belanja Tidak Terduga kedalam Belanja SKPD untuk mendanai keperluan mendesak;
4. Penggunaan SiLPA TA. 2023;
5. Pergeseran Anggaran antar kegiatan dan antar sub kegiatan dalam rangka penyesuaian nomenklatur kegiatan;
6. Pergeseran anggaran antar kelompok belanja dan jenis belanja dalam sub kegiatan yang sama.

Selain itu adanya perubahan target pendapatan daerah diproyeksikan mengalami penurunan, belanja daerah mengalami peningkatan, penerimaan pembiayaan bertambah serta pengeluaran pembiayaan berkurang. Dengan perubahan hal tersebut diatas perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Formulir E.60 yang menjadi formulir dalam penilaian Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 sampai dengan triwulan II dapat dilihat dalam lampiran dokumen ini.

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2024. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2024 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Nasional

Kondisi ekonomi Nasional terus mengalami tren peningkatan positif setelah terdampak Covid-19. Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2024 sebesar 5,11 persen (y-o-y), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04 persen (y-o-y). Peningkatan ekonomi Nasional diperkirakan terus meningkat dengan didukung oleh peningkatan permintaan domestik, terutama dari berlanjutnya pertumbuhan konsumsi dan investasi bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2024 didukung oleh permintaan domestik yang lebih tinggi. Konsumsi rumah tangga tumbuh seiring dengan pelaksanaan Pemilu 2024, hari libur nasional, momen ramadhan dan cuti bersama. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga tercermin dari sisi lapangan usaha dan spasial. Dari sisi lapangan usaha hampir seluruh lapangan usaha pada triwulan I 2024 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan yang tinggi antara lain adalah transportasi, pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta perdagangan besar dan eceran. Dari sisi spasial pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya.

Ekonomi Indonesia tahun 2024 berpeluang tumbuh lebih baik, target kondisi ekonomi yang diinginkan tersebut akan ditempuh melalui terjaganya iklim investasi yang kondusif, peningkatan produktivitas, daya beli masyarakat terjaga dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Tahun 2024 dioptimalkan untuk mencapai target pembangunan berdasarkan arahan Presiden dan RPJMN 2022-2024.

3.1.2 Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Kondisi ekonomi Sumatera Utara tahun 2024 menunjukkan beberapa tren positif meskipun menghadapi beberapa tantangan. Ekonomi Sumatera Utara pada triwulan I tahun 2024 tumbuh sebesar 4,88 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (yoy). Meskipun melambat dari triwulan IV 2023 yang tumbuh sebesar 5,02 persen. Salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara adalah terjadinya perlambatan kinerja konsumsi pemerintah dan investasi seiring dengan siklus penyerapan anggaran belanja pemerintah yang masih rendah di awal tahun, tidak hanya itu sikap *wait and see* investor ditengah berlangsungnya pemilu 2024 juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Meski demikian, perekonomian Sumatera Utara masih tetap kuat di topan oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekspor dan impor. Hal ini sejalan dengan perayaan tahun baru imlek dan indikasi pergeseran pola konsumsi menjelang bulan ramadhan, peningkatan permintaan ekspor, dan pemulihan harga komoditas internasional. Secara keseluruhan kondisi ekonomi provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 menunjukkan pemulihan yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi yang solid dan perbaikan dalam berbagai indikator sosial-ekonomi.

Inflasi Sumatera Utara pada triwulan I 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan di atas sasaran inflasi tahun 2024 sebesar $2,5 \pm 1,0$ persen (yoy). Inflasi Sumatera Utara pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 3,67 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,25 persen (yoy). Inflasi Sumatera Utara juga tercatat lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 3,05 persen (yoy). Tekanan inflasi bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kemudian diikuti oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran. Inflasi berdasarkan komoditas didorong oleh kenaikan harga beras, cabai merah, daging ayam ras, dan sigaret kretek mesin (SKM). Kenaikan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kenaikan biaya produksi dan tingginya permintaan barang dalam satu waktu tertentu.

Seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi, proyeksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara lima tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Persentase realisasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara menurut lapangan usaha sebagai berikut;

Tabel 3.1
Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 sampai Triwulan II 2024

Lapangan Usaha	Realisasi Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	TW II 2024
a. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	21,34	22,04	22,98	23,59	24,52
b. Pertambangan dan Penggalian	1,28	1,25	1,21	1,17	1,16
c. Industri Pengolahan	19,29	19,53	19,13	18,44	18,29
d. Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
e. Pengadaan Air, Pengelolaan sampah dan limbah.	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09
f. Kontruksi	13,58	13,46	13,23	13,20	12,70
g. Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	18,89	18,91	18,99	19,08	18,76
h. Transportasi dan Pergudangan	4,49	4,17	4,54	5,05	4,97
i. Akomodasi dan Makan Minum	2,18	2,05	2,04	2,11	2,14
j. Informasi dan Komunikasi	2,28	2,34	2,33	2,30	2,22
k. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,90	2,97	2,97	2,88	2,80
l. Real Estate	5,26	5,11	4,88	4,66	4,53
m. n. Jasa Perusahaan	1,07	1,03	1,05	1,06	1,05
o. Adm pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial	3,72	3,54	3,17	3,00	3,45
p. Jasa pendidikan	1,91	1,86	1,77	1,75	1,73
q. Jasa Kegiatan sosial, dan	1,03	0,99	0,95	0,94	0,93
r. s.t.u. Jasa Lainnya	0,57	0,54	0,55	0,58	0,56

Sumber data : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024

Kebijakan ekonomi yang telah dijalankan untuk meningkatkan daya beli masyarakat antara lain melalui kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang mendorong peningkatan daya beli produk UMKM/IKM, stimulus ekonomi pada sektor-sektor perekonomian yaitu pariwisata, pertanian, investasi, perindustrian, perdagangan dan peningkatan infrastruktur pada kawasan strategis ekonomi serta penyaluran *social safety net* bagi masyarakat dalam rangka menurunkan tingkat Kemiskinan Ekstrem dan Stunting melalui APBD Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya, dalam rangka mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi, kebijakan yang disusun oleh Provinsi Sumatera Utara mengarah pada hal-hal berikut;

1. Pemulihan sektor pertanian melalui bantuan benih; bantuan sarana dan prasarana; bantuan peralatan; penguatan sumber daya manusia pelaku pertanian; serta berbagai stimulus lain pada sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga kestabilan inflasi;

2. Pemulihan industri dalam negeri melalui penguatan industri yang bernilai tambah; penguatan mutu dan standarisasi produk; penguatan skill dan peningkatan sumber daya manusia pelaku industri;
3. Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui optimalisasi KSPN Danau toba dan berbagai destinasi-destinasi unggulan lainnya; penciptaan destinasi-destinasi dan desa-desa wisata baru; pelaksanaan event-event wisata dan budaya; penguatan sumber daya manusia pelaku pariwisata; penguatan mutu dan standarisasi produk UMKM dan IKM; penguatan digitalisasi dan ekspor produk UMKM dan IKM, serta penguatan sumber daya manusia pelaku UMKM dan IKM;
4. Peningkatan investasi melalui kemudahan perizinan; harmonisasi peraturan dan; peningkatan investasi pada berbagai proyek strategis;
5. Penguatan daya beli dan penjangkaran inflasi yang dilaksanakan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

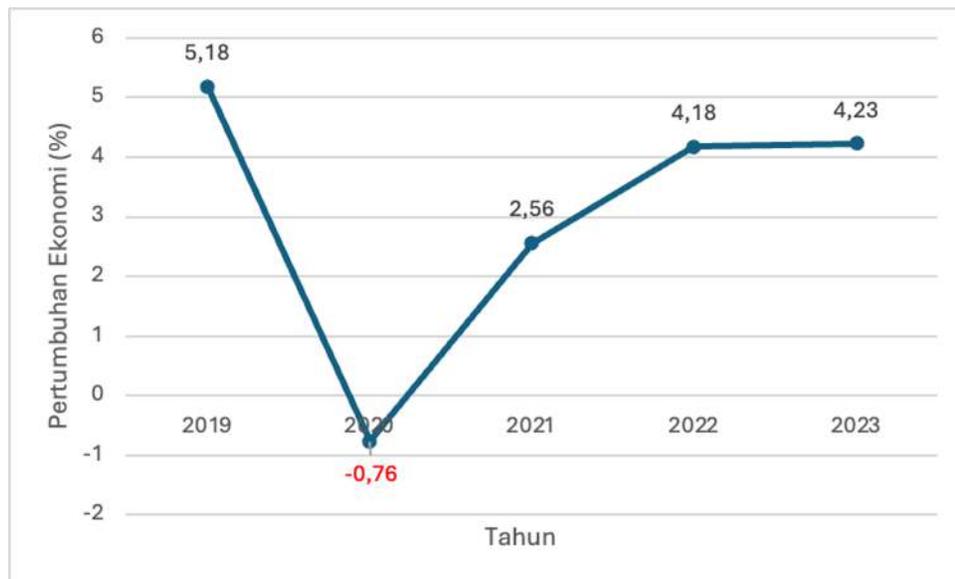
3.1.3 Kondisi Ekonomi Daerah

3.1.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merefleksikan peningkatan produksi seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin bergairahnya kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, yang pada hakekatnya meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi disuatu daerah dapat diukur menggunakan indikator seperti Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Regional Bruto (PRB). Produk Domestik regional Bruto (PDRB) adalah ukuran total barang dan jasa yang dihasilkan disuatu wilayah tertentu dalam priode satu tahun. PDRB digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi disuatu daerah dan membandingkan kinerja ekonomi antar wilayah. Peningkatan PDRB dipengaruhi oleh beberapa faktor penting seperti Konsumsi rumah tangga, Investasi, pengeluaran Pemerintah, dan Ekspor net (selisih harga ekspor dan impor).

Nilai PDRB berdasarkan harga berlaku Kabupaten Tapanuli Tengah selama lima tahun mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2023 trus mengalami peningkatan signifikan terutama pada tahun 2022 hingga 2023 setelah terjadinya Covid-19 atau masa transisi ke new normal. Salah satu penyebabnya adalah upaya pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan cara memberi bantuan sosial baik bantuan langsung tunai maupun bantuan berupa kebutuhan pokok bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. nilai PDRB berdasarkan harga berlaku Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2022 sebesar RP. 11.635,30 Miliar kemudian pada tahun 2023 meningkat sebesar Rp. 12.631,77 Miliar. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat mengalami peningkatan.

Gambar 3.1
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (y-on-y) KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2019-2023



Sumber data : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Dalam beberapa tahun terakhir setelah terjadinya wabah Covid-19 yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah sempat mengalami kontraksi signifikan mencapai -0,76 persen pada tahun 2020. Namun pada tahun selanjutnya pemerintahan terus berupaya agar pertumbuhan ekonomi kabupaten Tapanuli Tengah agar tetap stabil dan mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah terus mengalami peningkatan seiring dengan normalnya aktivitas masyarakat setelah terdampak Covid-19. laju pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun mulai dari tahun 2019 hingga 2023 terus bertumbuh. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan mencapai 4,23 persen meningkat signifikan dibandingkan tahun 2021 sebesar 2,56 persen.

3.1.3.2. PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita menunjukkan besarnya pendapatan yang diperoleh setiap penduduk per tahun secara rata-rata. Nilai pendapatan perkapita dapat dilihat melalui *proxy* menggunakan indikator PDRB per Kapita dimana indikator ini didapatkan dari nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. Angka PDRB per Kapita tersebut secara makro digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan penduduk. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha menunjukkan peningkatan yang fluktuatif. Berdasarkan distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki persentase tertinggi yakni 46,80 persen, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,55 persen, sektor konstruksi 12 persen, sektor industri pengolahan 11,25 persen, Administrasi pemerintahan, pertahanan

danjaminan sosial sebesar 7,20 persen. Kontribusi masing-masing sektor tersebut memiliki persentase tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Meskipun demikian peningkatan persentase PDRB atas dasar berlaku secara umum berfluktuatif dan relatif stabil di masing-masing sektor. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan ataupun pembangunan di setiap sektor masih dirasa kurang optimal sehingga perlu perhatian khusus dari pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk mencapai pengembangan ekonomi makro yang optimal perlu mempertimbangkan beberapa indikator agar kebijakan yang diambil oleh pemerintahan dapat dicapai dengan baik dan tepat sasaran. Adapun indikator ekonomi makro terdiri dari Indeks pembangunan manusia (IPM), Laju pertumbuhan ekonomi (LPE), Tingkat pengangguran terbuka (TPT), Persentase penduduk miskin, indeks gini dan PDRB perkapita.

Struktur perekonomian makro Kabupaten Tapanuli Tengah masih didominasi oleh sektor/lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan peranan sebesar 46,80 persen pada tahun 2023, meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya. Jika dilihat secara umum pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku berdasarkan lapangan usaha menunjukkan tren peningkatan meskipun tidak signifikan, namun dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk menghindari ketergantungan pada satu sektor ekonomi maka dibutuhkan upaya untuk diversifikasi ekonomi sehingga pengungkit pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Tengah tidak hanya bergantung pada satu sektor saja

Gambar 3.2
STRUKTUR PEREKONOMIAN MAKRO KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2022 DAN 2023 BERDASARKAN PDRB ADH BERLAKU (PERSEN)

2022*	Kategori/Lapangan Usaha	2023**
46,76	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	46,80
0,26	B. Pertambangan dan Penggalan	0,26
11,6	C. Industri Pengolahan	11,25
0,56	D. Pengadaan listrik dan gas	0,53
0,12	E. Pengadaan air, pengadaan sampah, limbah dan daur ulang	0,12
11,7	F. Konstruksi	12,00
12,57	G. Perdagangan besar & eceran, reparasi mobil & sepeda motor	12,55
2,41	H. Transportasi dan pergudangan	2,74
1,33	I. Penyediaan akomodasi & makan minum	1,32
0,66	J. Informasi dan Komunikasi	0,65
0,96	K. Jasa keuangan dan Asuransi	0,96
1,94	L. Real Estat	1,94
0,34	M.N. Jasa perusahaan	0,34
7,2	O. Administrasi pemerintahan, pertahanan & Jaminan sosial wajib	7,20
0,93	P. Jasa pendidikan	0,93
0,33	Q. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,33
0,09	R.S.T.U Jasa lainnya	0,09

Sumber data : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kesejahteraan sosial. Indeks ini terdiri dari tiga dimensi yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi pengeluaran. Berdasarkan indikator pendukung indeks pembangunan manusia (IPM) menunjukkan bahwa Usia harapan hidup masyarakat kabupaten Tapanuli Tengah mengalami peningkatan sejak lima tahun kebelakang dari 67,08 Tahun menjadi 71,76 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten tapanuli Tengah semakin membaik. Hal ini didukung oleh peningkatan infrastruktur pelayanan kesehatan dan juga perhatian terhadap gizi ibu dan anak yang terus dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Gambar 3.3
Usia Harapan Hidup Tahun 2019 - 2023



Sumber data : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

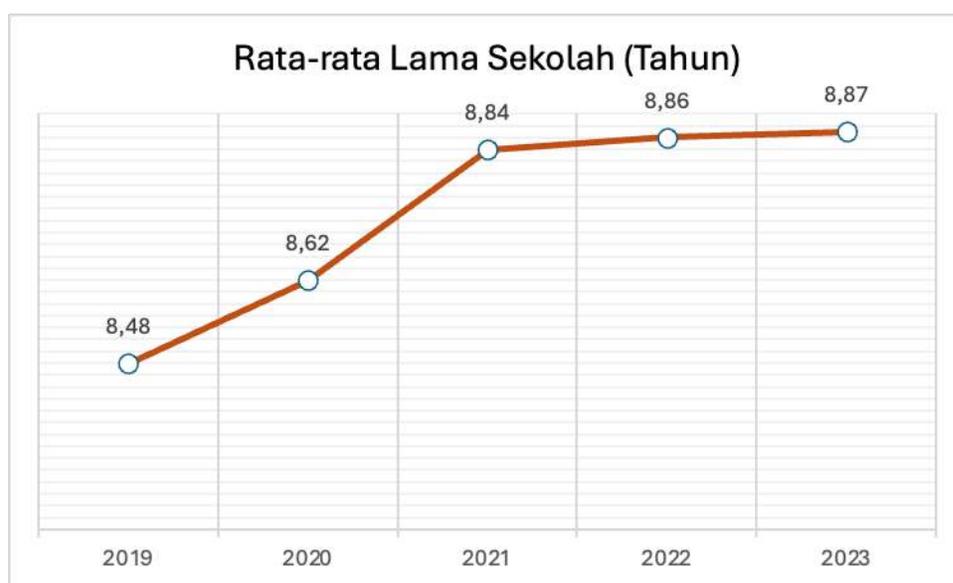
a) Pendidikan

Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Indikator pendidikan yang menjadi komponen pembentuk IPM yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

- **Rata-rata lama Sekolah (RLS)**

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun penduduk sudah menyelesaikan jenjang pendidikan.

Gambar 3.4
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2019 - 2023



Sumber data : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

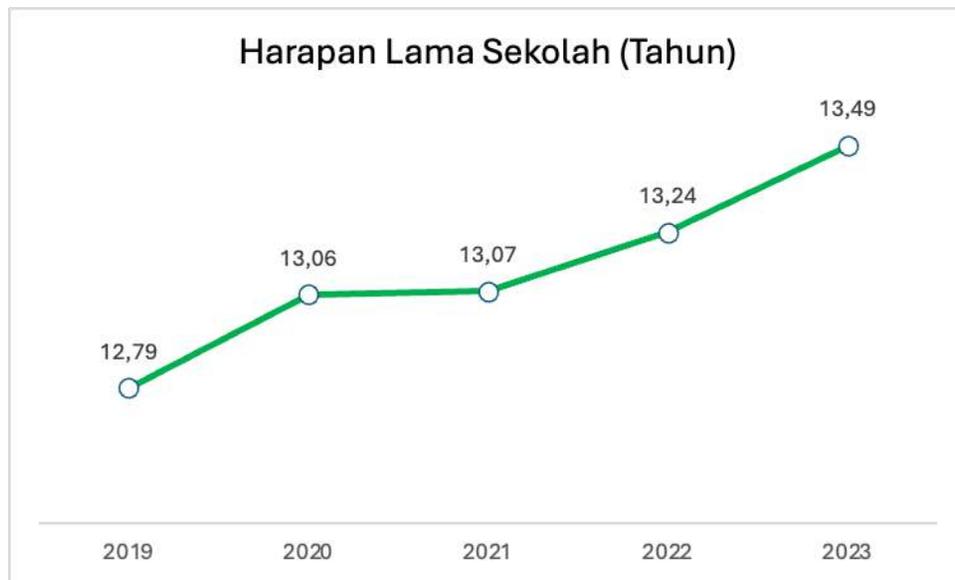
• **Harapan lama Sekolah (HLS)**

Pertumbuhan positif juga terjadi pada indikator Harapan lama sekolah (HLS). Indikator harapan lama sekolah menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal dan dihitung dari usia 7 tahun keatas. Dalam rentang waktu selama lima tahun terakhir harapan lama sekolah (HLS) menunjukkan tren peningkatan positif sebesar 12,79 tahun hingga 13,49 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia 7 tahun dapat melanjutkan jenjang pendidikan hingga SMA atau D1. Hal ini memiliki pengaruh positif terhadap potensi sumberdaya manusia pada generasi mendatang yang lebih baik.

Selain Rata-rata Lama Sekolah, indikator lain yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). Indikator HLS merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Indikator Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. HLS dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai

HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

Gambar 3.5
Harapan lama sekolah (HLS) Tahun 2019 - 2023



Sumber data : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Pengeluaran perkapita menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Capaian indikator pengeluaran perkapita juga mengalami peningkatan setelah kembali normalnya wabah Covid-19. upaya pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menanggulangi dampak Covid-19. Tingkat pengeluaran perkapita Kabupaten Tapanuli Tengah trus mengalami peningkatan sejak tiga tahun terakhir setelah kembali normalnya aktivitas masyarakat karna dampak dari wabah Covid-19. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan pengeluaran perorangnya dari Rp. 10.138 meningkat menjadi Rp. 10.690/orang. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya lapangan usaha untuk menambah pendapatan masyarakat yang berpengaruh terhadap pengeluaran perkapita.

Gambar 3.6
Pengeluaran Perkapita Tahun 2019 - 2023



Sumber data : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

3.1.3.3. Penduduk Miskin

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Gambaran kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah tersaji pada tabel di bawah ini:

Gambar 3.7
Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2023



Sumber data : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Selain itu terdapat pula kemiskinan ekstrem dimana Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, Pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Dikategorikan sebagai miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan eskترم; setara dengan USD 1.9 PPP (Purchasing Power Parity). PPP ditentukan menggunakan "absolute poverty measure" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Menurut Badan Pusat Statistik, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan.

Penghapusan miskin ekstrem menjadi salah satu indikator Tujuan 1 yaitu: Tanpa Kemiskinan di Sustainable Development Goals (SDGs). Kemiskinan ekstrem pada 2024 harus mencapai 0%, maka diperlukan upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, serta upaya validasi data dan mempertajam basis data untuk mencapai ketepatan target dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran dilakukan melalui strategi kebijakan yang meliputi: Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.

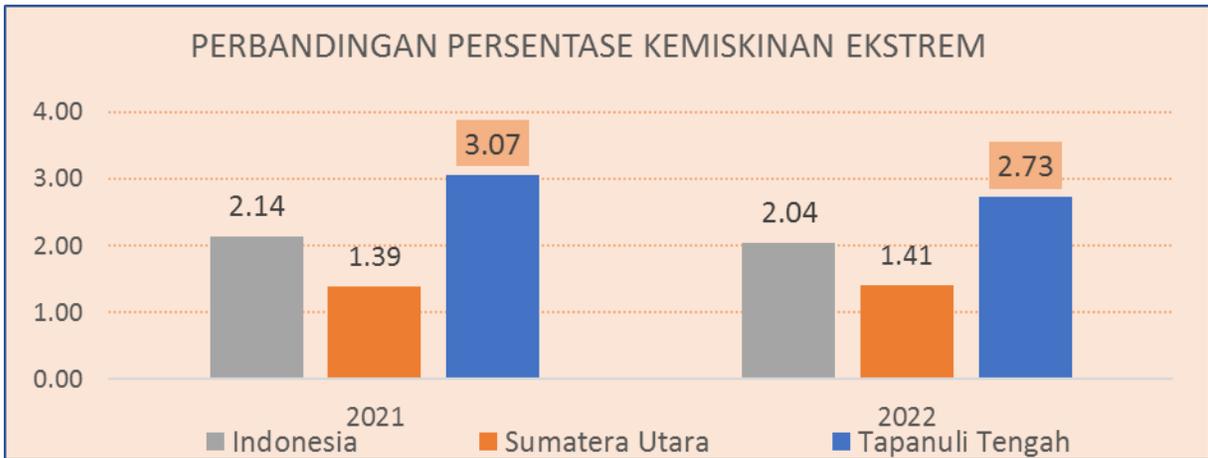
Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang PMK Nomor 25 Tahun 2022, Kabupaten Tapanuli Tengah ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023-2024.

Tabel 3.2
Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2021-2022

No	Daerah	Kemiskinan (x.000 jiwa)		Kemiskinan Ekstrem (x.000 jiwa)	
		2021	2022	2021	2022
1	Tapanuli Tengah	49.95	47.07	12,09	10,98
2	Sumatera Utara	1.343,86	1.268,19	208,06	212,81
3	Indonesia	27.542,77	26.161,16	5.800,05	5.590,72

Pada tahun 2022, terjadi penurunan jumlah individu dengan kemiskinan ekstrem yaitu dari 12.092 jiwa menjadi 10.997 jiwa, atau 3,07 % menjadi 2,73 %. Posisi tersebut masih diatas angka nasional.

Gambar 3.8
Grafik Perbandingan Persentase Kemiskinan Ekstrem

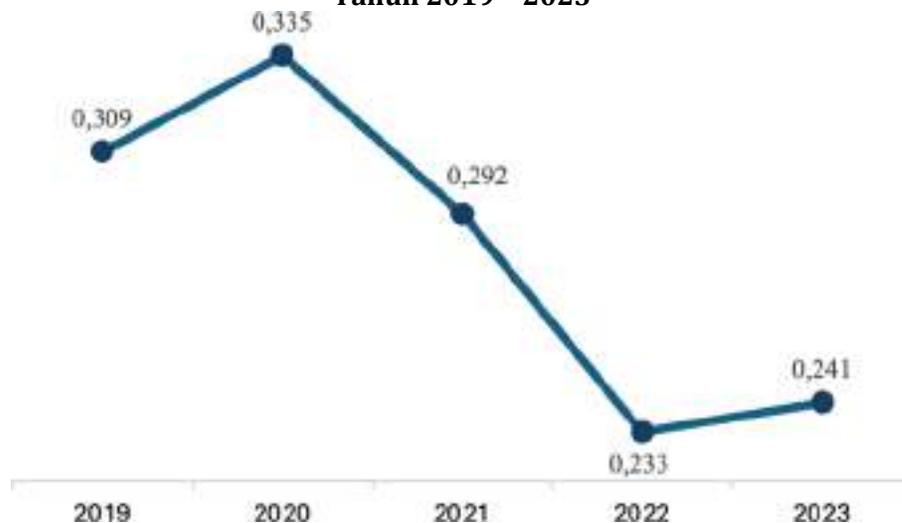


Sumber : BPS Kab. Tapanuli Tengah

3.1.3.4. Gini Rasio

Gini Rasio adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Distribusi pendapatan semakin merata ketika koefisien rasio gini antara 0,20 s/d 0,35 dan sebaliknya distribusi pendapatan dikatakan sangat timpang antara 0,50 s/d 0,70. Tingkat ketimpangan penduduk Kabupaten tapanuli Tengah 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif. Pada tahun 2022 menunjukan tren positif dimana ketimpangan pendapatan mengalami penurunan signifikan sebesar 0.233 dari 0,335 pada tahun 2020 salah satu faktor yang mempengaruhi adalah adanya bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat akibat dampak dari wabah Covid-19 sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun pada tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan yakni sebesar 0,241 meningkat 0,008 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring pulihnya aktivitas masyarakat dan berkurangnya bantuan sosial bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Gambar 3.9
Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Tapanuli tengah
Tahun 2019 - 2023



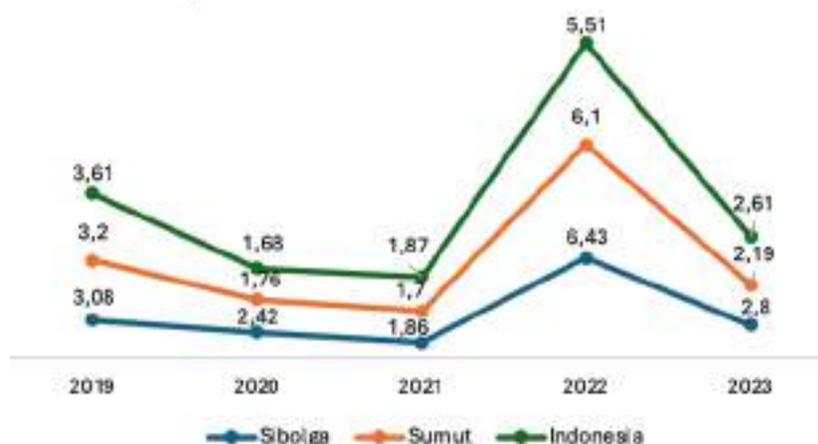
Sumber data : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Penurunan indeks Gini rasio disebabkan oleh beberapa faktor salah satu faktor utamanya adalah membaiknya kinerja aktivitas ekonomi diberbagai sektor lapangan usaha yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah.

3.1.3.5. Inflasi

Secara umum laju inflasi merupakan persentase kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu priode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju inflasi adalah permintaan dan penawaran barang, biaya produksi, kebijakan moneter, dan perubahan nilai tukar mata uang. Pendekatan laju inflasi Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan laju inflasi di Kota Sibolga. Pada kurun waktu 2019-2023 secara umum laju inflasi Kota Sibolga mengalami penurunan. Meskipun terjadi kenaikan signifikan pada tahun 2022 sebesar 6,43 persen, namun pada 2023 pemerintahan berhasil menekan laju inflasi menjadi 2,80 persen. Kenaikan laju inflasi tentu akan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Kebutuhan bahan makanan menjadi penyumbang terbesar mempengaruhi tingkat laju inflasi di kota sibolga dan sekitarnya.

Gambar 3.10
Laju Inflasi Tahun 2019-2023



Sumber data : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

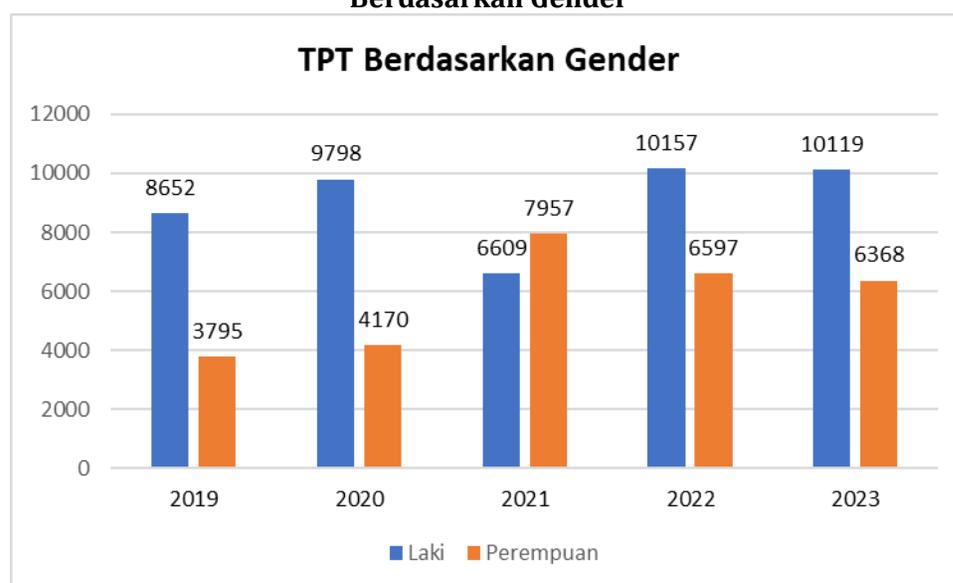
Laju inflasi Kota Sibolga bila dilihat rata-rata diatas laju inflasi Provinsi dan Nasional. Peningkatan inflasi tidak hanya diengaruhi oleh kondisi internal saja, tetapi juga Nasional dan global. Pada tahun 2025 pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah optimis inflasi di kabupaten/kota tersebut akan tetap stabil dan bahkan berkurang.

3.1.3.6. Tingkat Penangguran Terbuka

Ketenagakerjaan Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha yang tersedia di daerah. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tapanuli Tengah bergerak secara fluktuatif. Penurunan angka pengangguran signifikan terjadi pada tahun 2021 sebesar 7,24 persen kemudian meningkat pada tahun 2022 sebesar 7,98 persen dan pada tahun 2023 sedikit menurun menjadi 7,81 persen. Berdasarkan data BPS tingkat pengangguran secara

umum mengalami peningkatan sejak lima tahun terakhir. TPT berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2023 menunjukkan TPT laki-laki lebih tinggi sebesar 10.119 orang, dibandingkan TPT perempuan sebesar 6.368 orang. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan bahwa tren pengangguran terbuka berdasarkan gender menunjukkan terjadi penurunan terhadap gender perempuan. Hal ini disebabkan oleh rata-rata penduduk perempuan yang ada di Tapanuli Tengah bekerja secara mandiri atau memiliki usaha sendiri dan juga dominan bekerja disektor usaha mikro. Hal ini berbanding terbalik dengan gender laki-laki dimana tingkat pengangguran relatif tinggi dan stabil. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka gender laki-laki adalah sektor pekerjaan yang rentan dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi serta lama kerja memakai sistem kontrak atau memiliki jangka waktu tertentu.

Gambar 3.11
Tingkat Pengangguran Terbuka
Berdasarkan Gender



Jika dilihat secara umum jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Peningkatan rasio angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh lapangan kerja menyebabkan tingkat pengangguran terbuka juga ikut meningkat. Pada tahun 2019 menunjukkan tingkat angkatan kerja sebanyak 171.470 orang, meningkat menjadi 211.032 orang pada tahun 2023. Sementara tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 sebesar 12.447 orang, meningkat menjadi 16.487 orang pada tahun 2023.

TPAK mengidentifikasi besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK mencerminkan penyediaan tenaga kerja atau jumlah angkatan kerja. TPAK merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja dalam kelompok yang sama. Semakin besar TPAK, semakin besar jumlah angkatan kerja dalam kelompok yang sama. Sebaliknya, semakin besar jumlah penduduk yang masih bersekolah dan mengurus rumah tangga, semakin besar jumlah

yang tergolong bukan angkatan kerja, semakin kecil jumlah angkatan kerja, akan berakibat semakin kecil TPAK.

TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Perkembangan angkatan kerja dan TPAK di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3.11
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019 - 2023



Sumber data : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap ketenagakerjaan di Kabupaten Tapanuli Tengah sejak tahun 2020 hingga saat ini akibat penurunan aktivitas usaha yang melibatkan tenaga kerja, pengurangan jam kerja dan bahkan PHK terhadap tenaga kerja akibat meruginya perusahaan. Namun demikian pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah tetap optimis untuk menekan tingkat pengangguran dengan cara membuka lapangan pekerjaan melalui pendampingan UMKM, pelatihan dan pemberian akses permodalan.

3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023

3.1.4.1. Tantangan

Perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian nasional dan global sehingga diperlukan pemulihan ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19 sehingga tantangan yang dihadapi antara lain :

1. Pengendalian inflasi
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan/ mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial dan strategis

3. Mendorong investasi yang berwawasan lingkungan
4. Penguatan Koperasi dan UMKM serta pelaku-pelaku usaha pada sektor-sektor ekonomi potensi lokal dan strategis seperti pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, industri dan perdagangan.
5. Peningkatan daya saing produk dan sumber daya manusia agar dapat bersaing di pasar global;
6. Penghapusan kemiskinan ekstrim
7. Penurunan stunting
8. Peningkatan pelayanan sektor pendidikan dan kesehatan
9. Peningkatan kondisi infrastruktur; dan
10. Peningkatan peran pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

3.1.4.2. Prospek Perekonomian Daerah

Secara Nasional pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi tahun 2024 akan lebih baik dari tahun 2023 hal ini dapat dilihat dari target pertumbuhan tahun 2024 sebesar 5,3%-5,7% , lebih tinggi dari target tahun ini sebesar 5,3%.

Secara umum, Prospek Perekonomian Daerah Tapanuli Tengah tahun 2024 adalah:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan dan pengembangan inovasi daerah. Pengembangan inovasi didorong untuk pemanfaatan teknologi tepat guna yang secara langsung dapat diaplikasikan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat; dan
2. Pemulihan daya saing ekonomi. Kebijakan pemulihan daya saing ekonomi diarahkan untuk mengakselerasi tiga lapangan usaha penyumbang PDRB terbesar Tapanuli Tengah. Strategi yang perlu ditempuh adalah melalui peningkatan investasi, penyiapan tenaga kerja berkualitas, pembangunan infrastruktur penunjang, pencetakan wirausahawan baru dan pengembangan ekonomi kreatif.
3. Pencapaian target indikator Kinerja makro tahun 2024;

Tabel 3.3
Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi	Target	Capaian Kinerja
				2023	2024	TW II 2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,18	4,23	4,25-5,25	4,23
2	Laju Inflasi	%	6,43	3,75	2	3,75
3	Indeks Gini	Point	0.233	0,241	0,212	0,241
4	Indeks Pembangunan manusia (IPM)	indeks	70,31	72,77	70,74-71,14	72,77
5	Tingkat Pengangguran	%	7,97	7,81	6,50	7,81

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi	Target	Capaian Kinerja
				2023	2024	TW II 2024
	Terbuka					
6	Tingkat Kemiskinan	%	11,71	11,50	10,67 – 11,67	11,50
7	PDRB Perkapita	Rp	31,05	32,649	32,96	32,649

Laju pertumbuhan ekonomi mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun awal sebesar 4,23. Sektor penyumbang PDRB tertinggi yakni Pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi serta industri pengolahan. Laju inflasi juga mengalami penurunan angka yang dimana pada tahun 2022 sebesar 6,43 persen, menurun menjadi 3,75 persen dan pada Triwulan II 2024 masih stabil pada angka 3,75 persen. Secara keseluruhan indikator kinerja makro Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan kontribusi positif untuk pengembangan wilayah.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Alokasi Dana Desa dari APBN; 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya dan Dana insentif daerah. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.

Untuk mendukung terwujudnya peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, arah kebijakan yang dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal.
2. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
3. Optimalisasi aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah.
4. Optimalisasi hasil usaha BUMD agar memberikan kontribusi yang optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.

5. Mengupayakan penambahan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Bagi Hasil.
6. Menggali sumber-sumber pendapatan alternatif lainnya.
7. Khusus untuk pendapatan lain-lain yang sah, bagi hasil dari Pemerintah Provinsi berperan penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam mendukung pendanaan berbagai program dan kegiatan. Bagi hasil dari Pemerintah Provinsi ini antara lain Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan lain-lain. Pendapatan dari Bagi Hasil dengan Pemerintah Provinsi ini sangat terkait dengan aktivitas ekonomi daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat berperan dalam memberikan insentif dan dorongan aktivitas perekonomian daerah.

Selanjutnya realisasi dan proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)			Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		RKPD 2024	APBD INDUK 2024	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6 = (5 - 3)
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	Pendapatan Asli Daerah	87.847.220.683,00	91.847.220.683,00	92.234.322.987,00	387.102.304,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	27.378.087.000,00	27.378.087.000,00	27.378.087.000,00	-
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.657.500.000,00	3.657.500.000,00	3.657.500.000,00	-
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.253.065.683,00	10.253.065.683,00	10.640.167.987,00	387.102.304,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	46.558.568.000,00	50.558.568.000,00	50.558.568.000,00	-
					-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.089.148.093.854,00	1.140.142.624.097,00	1.143.783.466.017,00	3.640.841.920,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.034.986.350.757,00	1.085.980.881.000,00	1.084.383.466.017,00	(1.597.414.983,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.161.743.097,00	54.161.743.097,00	59.400.000.000,00	5.238.256.903,00
					-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.270.279.000,00	17.322.333.600,00	17.164.596.011,00	(157.737.589,00)
4.3.01	Pendapatan Hibah	270.279.000,00			
4.3.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000.000,00	17.322.333.600,00	17.164.596.011,00	(157.737.589,00)
					-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.192.265.593.537,00	1.249.312.178.380,00	1.253.182.385.015,00	3.870.206.635,00

Pendapatan Asli Daerah diperkirakan mengalami kenaikan sebesar Rp387.102.304,00 atau sebesar 0,42% dari Rp91.847.220.683,00 menjadi Rp92.234.322.987,00 komponen pembentukan PAD yang mengalami kenaikan adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebelumnya Rp10.253.065.683,00 menjadi Rp10.640.167.987,00 atau naik sebesar Rp387.102.304,00

Pendapatan Transfer pada APBD Induk Tahun 2024 sebesar Rp1.140.142.624.097,00 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp3.640.841.920,00 atau sebesar 0,32% menjadi Rp1.143.783.466.017,00 dibandingkan dengan target penerimaan pada rancangan perubahan RKPD 2024.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada rancangan perubahan RKPD 2024 berkurang sebesar Rp157.737.589,00 dari sebelumnya sebesar Rp17.322.333.600,00 APBD 2024 menjadi sebesar Rp17.164.596.011,00.

Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi pada sektor Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah. Secara umum pendapatan Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami peningkatan secara keseluruhan mencapai Rp. 3.870.206.635,00.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Belanja Daerah secara umum antara lain :

1. Belanja wajib dan mengikat
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
3. Belanja pendidikan, kesehatan dan infrastruktur
4. Belanja peningkatan pertumbuhan ekonomi
5. Belanja pemilukada, pengentasan kemiskinan ekstrim, penurunan prevalensi stunting
6. Belanja dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tapanuli Tengah yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada Pemerintahan Desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan DAU, DAK dan Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.
10. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap Perangkat Daerah diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian prioritas pembangunan Tahun 2022 yaitu Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Pengembangan Sentra-Sentra Ekonomi, Pengembangan Perekonomian Desa/Kelurahan, Peningkatan Pelayanan Publik, dan Peningkatan Kerjasama Daerah.
11. Mendukung program/kegiatan strategis dan prioritas yang terkait dengan agenda nasional dan provinsi sesuai dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah.

Selanjutnya realisasi dan proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2024

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)			Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		RKPD 2024	APBD INDUK 2024	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6 = (5 - 3)
5	BELANJA DAERAH				
5.1	Belanja Operasi	849.622.661.457,00	875.751.626.699,00	905.156.365.541,00	29.404.738.842,00
5.1.01	Belanja Pegawai	478.846.016.789,00	500.193.351.860,00	506.775.453.426,00	6.582.101.566,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.446.971.366,00	323.635.090.737,00	346.457.728.013,00	22.822.637.276,00
5.1.03	Belanja Bunga	3.787.528.202,00	3.787.528.202,00	3.787.528.202,00	
5.1.05	Belanja Hibah	2.284.145.100,00	48.135.655.900,00	48.135.655.900,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	258.000.000,00			
5.2	Belanja Modal	103.560.344.203,00	171.598.045.390,00	190.808.727.280,00	19.210.681.890,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.811.537.681,00	41.010.816.228,00	48.239.311.770,00	7.228.495.542,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.169.289.313,00	51.536.917.652,00	62.513.648.057,00	10.976.730.405,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.620.389.497,00	73.374.393.519,00	74.417.411.418,00	1.043.017.899,00

5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.959.127.712,00	5.675.917.991,00	5.638.356.035,00	(37.561.956,00)
5.3	Belanja Tidak Terduga	31.719.603.753,00	2.857.678.767,00	3.176.719.329,00	319.040.562,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	31.719.603.753,00	2.857.678.767,00	3.176.719.329,00	319.040.562,00
5.4	Belanja Transfer	207.571.138.000,00	208.083.977.400,00	208.083.977.400,00	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.103.558.700,00	3.103.558.700,00	3.103.558.700,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	204.467.579.300,00	204.980.418.700,00	204.980.418.700,00	
	JUMLAH BELANJA	1.192.473.747.413,00	1.258.291.328.256,00	1.307.225.789.550,00	48.934.461.294,00

Peningkatan juga terjadi pada anggaran belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yakni Belanja Daerah sebesar Rp. 29.404.738.842,00, (Belanja pegawai, barang dan jasa) dan Belanja Modal meningkat sebesar Rp. 19.210.681.890,00 (Belanja modal peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya serta belanja modal tak terduga)

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali atau diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto yang akan digunakan untuk menutupi defisit.

Penerimaan pembiayaan Tapanuli Tengah Pada APBD Induk TA. 2024 diasumsikan sebesar Rp19.631.996.000,00 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2023 dan pada Rancangan Perubahan RKPD 2024 disesuaikan menjadi sebesar Rp64.696.250.659,00. adapun Rincian Penggunaan SiLPA Pada Perubahan APBD tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2023

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)			Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		RKPD 2024	APBD INDUK 2024	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6 = (5 - 3)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				-
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	10.861.000.000,00	19.631.996.000,00	64.696.250.659,00	45.064.254.659,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	10.861.000.000,00	19.631.996.000,00	64.696.250.659,00	45.064.254.659,00

3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah				-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.861.000.000,00	19.631.996.000,00	64.696.250.659,00	45.064.254.659,00
					-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.652.846.124,00	10.652.846.124,00	10.652.846.124,00	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	10.652.846.124,00	10.652.846.124,00	10.652.846.124,00	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.652.846.124,00	10.652.846.124,00	10.652.846.124,00	-
					-
	PEMBIAYAAN NETTO	208.153.876,00	8.979.149.876,00	54.043.404.535,00	45.064.254.659,00
					-
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		-	-	-

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2022 Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 Tujuan pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Rencana Pembangunan Daerah periode 2023–2026 diukur melalui indikator tujuan yang kemudian menjadi indikator makro daerah bagi pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Indikator Tujuan RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Indikator	Kondisi Awal	Target Akhir
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi	Na	65,00 (B)
Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing SDM Tapanuli Tengah	Indeks Pembangunan Manusia	69,61	71,49-71,89
Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Taapanuli Tengah	Tingkat Kemiskinan	12,67	10,00-11,00
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,56	4,00-6,00

Berdasarkan pada tabel tersebut, maka penjelasan masing-masing tujuan dan ditetapkan sasaran pembangunan pada setiap tujuan yaitu :

1. Tujuan Pertama, Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) merupakan konsep penyelenggaraan tata pemerintahan yang menaati hukum, menghormati hak asasi manusia, menghargai nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, dan secara sadar dan sistematis membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus memenuhi unsur transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, yang merupakan dasar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih. Perwujudan *Good Governance* tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, tetapi juga pada kerja sama yang baik antara pemerintah, sektor swasta

dan masyarakat untuk mencapai konsesus bersama, di mana dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat efektif dan efisien.

Tujuan pertama, yaitu **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)** memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator sasaran Nilai SAKIP, Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT dengan indikator Indeks Pelayanan Publik

2. Tujuan Kedua, Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing SDM Tapanuli Tengah

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu aset penting dalam suatu pembangunan daerah. Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu didukung dengan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan serta pemanfaatan teknologi IT untuk membantu pengembangan kompetensi. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah terus mengupayakan peningkatan mutu, akses dan layanan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan yang berkeadilan, serta memberikan ruang bagi para pemuda untuk ikut serta dalam pembangunan, agar dapat tercipta sumber daya manusia di Kabupaten Tapanuli Tengah yang berkompeten dan berdaya saing.

Tujuan kedua, yaitu **Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing SDM Tapanuli Tengah** memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator Indeks Kesehatan
- b. Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat dengan indikator Indeks Pendidikan

3. Tujuan Ketiga, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tapanuli Tengah

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri semaksimal mungkin. Kesejahteraan merupakan keadaan ideal yang diinginkan oleh setiap masyarakat. Dukungan terhadap peningkatan kompetensi masyarakat di berbagai bidang termasuk dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja, berwirausaha, serta pengoptimalan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang ada dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah.

Tujuan ketiga yaitu **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tapanuli Tengah** memiliki rumusan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan indikator Indeks Pengeluaran dan PDRB Perkapita;
- b. Meningkatnya kompetensi angkatan kerja lokal dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka; dan



- c. Meningkatnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan indikator Indeks Gini.

4. Tujuan Keempat, Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan

Pandemi Covid-19 merupakan bencana yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Hancurnya sektor perekonomian sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Pertumbuhan perekonomian di beberapa daerah merosot tajam. Adanya fenomena Pandemi Covid-19 ini membuat seluruh daerah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomiannya agar tidak semakin terpuruk. Kabupaten Tapanuli Tengah termasuk salah satu daerah yang terkena dampak nyata dari adanya Pandemi Covid-19 ini, yang pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonominya mencapai -0,76. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah terus mengupayakan pertumbuhan perekonomian yang semakin meningkat. Peningkatan sektor perekonomian Tapanuli Tengah dilakukan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada secara optimal, baik dari sektor unggulan seperti pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor pariwisata maupun subsektor ekonomi kreatif. Selain mengelola sektor-sektor unggulan secara optimal, pembangunan infrastruktur untuk mendukung sarana dan prasarana setiap kegiatan juga terus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang merata. Dalam pengembangan perekonomian Tapanuli Tengah terdapat hal yang harus diperhatikan agar tidak berdampak signifikan atau menimbulkan permasalahan bagi Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang merupakan suatu konsep pengembangan perekonomian dengan memperhatikan lingkungan agar dapat berjalan beriringan dengan baik.

Tujuan keempat, yaitu **Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan** memiliki rumusan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah dengan indikator LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan LPE Kategori Industri Pengolahan;
- b. Meningkatnya kualitas kepariwisataan daerah dan ekonomi kreatif dengan indikator LPE Sektor Pariwisata dan LPE Subsektor Ekonomi Kreatif;
- c. Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata dengan indikator Indeks Infrastruktur; dan
- d. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Risiko Bencana.

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator beserta target dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah
Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Tahun Target
				2024
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	-	na	54,33 (CC)
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	-	31,46 (C) (2020)	40,00 (C)
	Indeks MCP (<i>Monitoring Center for Prevention</i>)	-	84,7	85,7
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	61,311 (2020)	62,752
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	na	57,50 (C)
Meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Tapanuli Tengah	Indeks Pembangunan Manusia	-	69,61	70,74-71,14
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	-	0,727	0,730
	Prevalensi stunting	-	25,3	24,3
Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	-	0,658	0,673
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah	Tingkat Kemiskinan	%	12,67	10,67-11,67
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Pengeluaran	-	0,706	0,710
	PDRB per Kapita	Juta Rp	28,75	31,62
Meningkatnya kompetensi angkatan kerja lokal	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,24	6,74
Meningkatnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini	-	0,335	0,318
Meningkatkan perekonomian	Laju Pertumbuhan	%	2,56	3,25-5,25

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Tahun Target
				2024
daerah yang berkelanjutan	Ekonomi..			
Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,34	2,40
	LPE kategori industri pengolahan	%	4,13	4,3475
Meningkatnya kualitas kepariwisataan daerah	LPE Sektor Pariwisata (akomodasi dan makan minum)	%	1,03	3,89
Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Indeks Infrastruktur	-	31,98	32.83
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	na	68,00
	Indeks Risiko Bencana	-	191,2	183,10

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

4.2.1 Prioritas Nasional Tahun 2024

Penyusunan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan Visi Misi Presiden, Arahan Presiden, 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dan hasil evaluasi RKP 2021 Triwulan III. Fokus tema pembangunan di tahun 2024 adalah infrastruktur dan SDM, sehingga kalimat tema 2024 adalah pemerataan kualitas infrastruktur pembangunan guna peningkatan mutu SDM. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2024, dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024. Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan RKP Tahun 2024 diarahkan untuk pemerataan kualitas infrastruktur pembangunan guna peningkatan mutu SDM dengan berorientasi pada pembangunan ke depan dengan yang lebih baik (*Build Forward Better*). Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2024 adalah Tema RKP Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Pemerintah Pusat menetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) dalam RKP 2024, yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan

- Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut diharapkan akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan Nasional pada tahun 2024 antara lain:

Tabel 4.3
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2024

Indikator Pembangunan	Target 2023
Pertumbuhan Ekonomi	5,30-5,70 Persen
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,00-5,970 Persen
Rasio Gini	0,374-0,377
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,99-74,02
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	26,8-27,1 Persen
Tingkat Kemiskinan	6,50-7,50 Persen

4.2.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Kebijakan pembangunan daerah Sumatera Utara tahun 2024 merupakan periode pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, dengan mempertimbangkan prioritas peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan, peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif, dengan memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2024 serta berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022, isu strategis serta permasalahan di Provinsi Sumatera Utara, maka dirumuskan Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah **“Sinergitas dan Peningkatan Kualitas Pembangunan dalam rangka mendukung percepatan Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”**.

Fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan pada Tahun 2024 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan;
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif;

3. Peningkatan Layanan Infrastruktur yang Berkelanjutan dalam Penguatan Konektivitas dan Daya Saing Produktivitas Wilayah; dan
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana pembangunan Daerah (RPD 2024-2026) pemerintah Provinsi Sumatera Utara menuangkan ke dalam 4 (Empat) prioritas pembangunan dengan menargetkannya ke dalam bentuk 43 (Empat Puluh Tiga) Kegiatan Strategis Inovatif. Empat prioritas pembangunan dan Empat Puluh Tiga kegiatan strategis Inovatif tersebut dituangkan ke dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas. Perangkat Daerah juga melaksanakan program dan kegiatan prioritas dalam kaitannya sebagai perwujudan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara disesuaikan dengan tugas dan fungsi kinerja Perangkat Daerah. Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2024 dalam bentuk Kegiatan Strategis Daerah, merupakan wujud dukungan terhadap Arah kebijakan pembangunan nasional yang diwujudkan dalam Major Project (MP), antara lain:

1). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan yang dilaksanakan melalui 15 (Lima Belas) kegiatan strategis Inovatif, yaitu

1. Rehabilitasi, Revitalisasi dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah pada 33 Kabupaten/Kota dan Pengembangan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) pada Sekolah Menengah, Kejuruan dan Khusus pada 33 Kabupaten/Kota;
2. Implementasi *Teaching Factory Link and Match* Vokasi dan Penguatan Pendidikan Universal berbasis kerja sama;
3. Pemberian Beasiswa Pendidikan SMA, SMK, SLB, S1/S2/S3 Masyarakat Sumatera Utara dan Pengembangan Kampung Beasiswa;
4. Pengembangan Kelas Pemberdayaan PEREMPUAN TOP SUMUT
5. Pembangunan TITIK BACA E- Book Digital melalui Scan QR/ Barcode dan Pengembangan e-Library Sumut;
6. Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan serta pelayanan RS Haji Medan dan Peningkatan Layanan RSJ. Ildrem;
7. Penurunan Prevalensi Stunting dengan Intervensi gizi sensitif dan spesifik;
8. Dukungan capaian *Universal Health Coverage* pada Kabupaten/Kota melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi
9. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
10. Optimalisasi Jangkauan Layanan Kesehatan melalui Mobil/Bus Medis Kesehatan bergerak dan Pelayanan Keliling Kesehatan Mental dan NAPZA (Mobile dan Telemedicine) – “Dr. M. Ildrem Menyapa”;

11. Sukses Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Utara dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
12. Sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai dan berkeadilan di Provinsi Sumatera Utara dan Edukasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Revolusi Mental, Kesadaran Politik dan Nilai-nilai Demokrasi Kepada Masyarakat dan Pelajar
13. Pengembangan Pencegahan Narkoba melalui Optimalisasi Kampung Bersinar (Bersih Narkoba);
14. Pengembangan Pencegahan Narkoba melalui Optimalisasi Kampung Bersinar (Bersih Narkoba); dan
15. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara melalui SUMUT TERJAMIN (Sumut Bersatu Tanggulangi Kemiskinan);

2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dilaksanakan melalui 11 (Sebelas) kegiatan strategis Inovatif, yaitu :

- a. Pembangunan North Sumatra Skill Development Center (NS-SDC)
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja dan penguatan fasilitas Kerjasama dengan dunia usaha & dunia industri melalui pelatihan tematik tenaga kerja serta pemagangan 1000 tenaga kerja ke luar negeri;
- c. Fasilitasi standarisasi dan Peningkatan pendapatan 1000 (seribu) UMKM dan IKM melalui digitalisasi pemasaran;
- d. Pengembangan Kawasan Pertanian Terintegrasi Menuju swasembada beras & jagung serta peningkatan produksi cabe merah, bawang merah, daging sapi, kambing/domba, perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- e. Pembentukan Petani Muda Milenial (PMM);
- f. Peningkatan Digitalisasi Promosi Pariwisata;
- g. Pengembangan Pola Kunjungan Wisata Terintegrasi (Bukit Lawang-Tangkahan, Danau Toba, Kepulauan Nias, dan Tabagsel) dan Peningkatan Kualitas *Calender of Event*;
- h. Pelaksanaan Event Internasional melalui Pesta Danau Toba, *Jungle Run*, *Triathlon*, *Traditional Music Festival*, Arung Jeram Festival dan Paralayang Festival serta Nias Pro; dan
- i. Dukungan Event F1H2O dan event Internasional lainnya serta Event Kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif pada 33 Kab/Kota;
- j. Dukungan Pengembangan *Unesco Global Geopark Caldera Toba* dan Desa Wisata Sumatera Utara; dan
- k. Penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif.

3. Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dilaksanakan melalui 11 (Sebelas) kegiatan strategis Inovatif, yaitu

- 1) Terlaksananya penanganan ruas jalan dan jembatan Provinsi di Kawasan Susur Pantai Timur, Kawasan Pariwisata Prioritas, Kepulauan Nias, Kawasan Pantai Barat Dan Kawasan Perbatasan di Provinsi Sumatera Utara 90% sampai dengan tahun 2026;
 - 2) Pembangunan Waduk/Embung Idano Mola di Kep. Nias;
 - 3) Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Persampahan Regional Kabupaten Deli Serdang–Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 - 4) Pembangunan SPAM Mebidang dan pembangunan SPAM Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi;
 - 5) Pengurangan Luas Kawasan Kumuh;
 - 6) Penataan sungai perkotaan yang bersih dan indah;
 - 7) Pembangunan Infrastruktur Pengaman Sungai pada Sungai Batang Serangan, Batang Gadis, Idano Gawo, Aek Sirahar, Aek Siageaon, Batang Ayumi, Bah Bolon;
 - 8) Pembangunan Satu Data Digital Daerah;
 - 9) Penyediaan sambungan listrik bagi keluarga kurang mampu;
 - 10) Pembangunan 3 Unit PLTS terpusat dalam rangka Meningkatkan produksi pertanian;
 - 11) Peningkatan Jaringan Irigasi di 5 (Lima) Daerah irigasi dengan produktivitas tertinggi;
- 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif** dilaksanakan melalui 6 (Enam) kegiatan strategis Inovatif, yaitu
- a. Mempertahankan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara melalui Pojok Konsultasi Akuntabilitas Kinerja Keuangan (KAKK) di Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Peningkatan Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Utara melalui Klinik RB;
 - c. Peningkatan Kualifikasi Pendidikan SDM Aparatur Negara/ASN melalui pemberian beasiswa S3 ASN;
 - d. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM ASN melalui Pelatihan dan studi komparasi dalam dan luar negeri;
 - e. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah melalui *Planning and Innovation Corner (PIC)*; dan
 - f. *Event North Sumatra Innovation and Achievement Week*.

Penetapan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun 2024, merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara dimana target Makro sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada RPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi 5,00-5,20 persen
2. Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 72,85-73,15
3. Persentase Kemiskinan menurun menjadi 8,25-8,15 persen
4. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi 5,80-5,50 persen

5. Indeks Gini (Gini Ratio) menurun menjadi 0,324 pola
6. Laju Inflasi menurun menjadi 3±1 persen
7. Emisi GRK menurun menjadi 40,04 juta Ton CO₂eq

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergis dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus/tema pembangunan tiap tahap yang menjadi acuan penentuan prioritas pembangunan RKPD setiap tahunnya

Tema Pembangunan Tahun 2024: ***“PEMERATAAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KUALITAS SDM DALAM MENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI GUNA MENINGKATKAN KESEJATERAAN MASYARAKAT”***.

Penguatan pembangunan inklusif di Tapanuli Tengah dapat menyebabkan pemerataan kesejahteraan di seluruh sektor/golongan masyarakat. Ekonomi inklusif ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang masih menjadi permasalahan di Tapanuli Tengah. Dalam mencapai tema tahun 2024, prioritas pembangunan Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut:

- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
- Peningkatan kualitas dan aksesibilitas fasilitas Pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM
- Peningkatan modal sosial masyarakat Tapanuli Tengah yang religius dan berbudaya
- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
- Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam rangka mendukung perekonomian dan Pelayanan Dasar

4.2.4 Program Prioritas Daerah

Program prioritas daerah merupakan program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Dalam perumusan dokumen perencanaan, program dianggap menjadi cikal bakal keberhasilan tujuan dan sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Program prioritas yang tercantum dalam tabel di bawah ini merupakan program yang sudah disesuaikan dengan nomenklatur di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang merubah nomenklatur dan kode.

Tabel 4.4.
Program Prioritas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	
			2024	OPD
			K	
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	60,50 (B)	
1.1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	45,00 (C)	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Wilayah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	96	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Peningkatan kesejahteraan masyarakat	96	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Produk hukum yang dikeluarkan	96	SEKRETARIAT DAERAH
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis Struktural dan Diklat Teknis Fungsional	80	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Dokumen Musrenbang Kabupaten/Kota	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan yang diterbitkan	100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase Petugas Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Indeks MCP (Monitoring Center for Prevention)	86,20	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Jumlah tindak lanjut temuan	485	INSPEKTORAT
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	64,193	

		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	100	BPKPAD
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah	51	BPKPAD
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan daerah	12	BPKPAD
1.2		Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Kepuasan Masyarakat	60,00 (C)	
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah	90	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Membangun Keterbukaan Publik	90	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Data dan Informasi Administrasi	100 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN TAPANULI TENGAH

	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama	6 OPD/Unit Terkait	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN TAPANULI TENGAH
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen R e n	100	SEKRETARIAT DPRD
	Presentase Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	100	SEKRETARIAT DPRD
	P e r s e n t a s e Terintegrasinya program-program DPRD u n t u k melaksanakan fungsi p e n g a w a s a n , pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	100	SEKRETARIAT DPRD

		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	285	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2		Meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Tapanuli Tengah	Indeks Pembangunan Manusia	70,74-71,14	
2.1		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,731	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	75	DINAS KESEHATAN
			Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	DINAS KESEHATAN
			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio dokter per satuan penduduk	0,17	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan puskesmas yang menyediakan obat sesuai dengan RKO (Rencana Kebutuhan Obat)	100	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita	9,67	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi stunting		

		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di RSUD Pandan	100	RSUD PANDAN
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rasio Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten (per 100.000 penduduk anak)	18,77	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.2		Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,681	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100	DINAS PENDIDIKAN
			Angka Kelulusan:	100	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	100	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Fasilitas Pendidikan	3	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	10,78	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah	Tingkat Kemiskinan	10,67-11,67	
3.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Pengeluaran	0,712	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	38	DINAS SOSIAL
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang tertangani di Kabupaten Tapanuli Tengah	15	DINAS SOSIAL
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Tapanuli Tengah	24	DINAS SOSIAL
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Pemuda Kader dan Pelopor)	250	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		PDRB per Kapita	32,96	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah unit usaha yang dilakukan pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan	135	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.2	Meningkatnya kompetensi angkatan kerja lokal	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,50	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,7	DINAS KETENAGAKERJAAN

		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,90	DINAS KETENAGAKERJAAN
			Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	5,0	DINAS KETENAGAKERJAAN
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tatakelola yang layak	3,3	DINAS KETENAGAKERJAAN
			Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh mediator HI	40	DINAS KETENAGAKERJAAN
3.3		Meningkatnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini	0,312	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHANDESA	Jumlah Desa Tertib dalam tata kelola d m. desa di Kabupaten Tapanuli Tengah	159	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dukungan Masyarakat Dalam Membangun Desa	100	

		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	2,20	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4		Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,25,5,25	
4.1		Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,44	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Konsumsi ikan	38,5	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	43,5	DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	43,5	DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	65	DINAS KETAHANAN PANGAN
			LPE kategori industri pengolahan	4,565	

		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Pemanantaun Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Peningkatan Nilai Investasi Penanaman Modal dan Dunia Usaha	127900000000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	75	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.2		Meningkatnya kualitas kepariwisataan daerah	LPE Sektor Pariwisata (akomodasi dan makan minum)	5,32	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2,66%	DINAS PARIWISATA

		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota	7,5%	DINAS PARIWISATA
			Persentase jumlah pertumbuhan wisatawan mancanegara per kebangsaan	292	DINAS PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	56,75	DINAS PARIWISATA
4.3		Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Indeks Infrastruktur	33.68	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	65	DINAS PEKERJAAN U M U M D A N PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Pengadaan Lampu Jalan Umum (LPJU)	1	DINAS PEKERJAAN U M U M D A N PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	66,26	DINAS PEKERJAAN U M U M D A N PENATAAN RUANG

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	0	DINAS PEKERJAAN U M U M D A N PENATAAN RUANG
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan Permukiman Kumuh yang ditangani	3,29	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rasio rumah layak huni	83,19	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana d	4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penggunaan tanah	100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Jenis Pelayanan Angkutan	90	D I N A S PERHUBUNGAN

			Rasio Kondisi Prasarana Perhubungan	90	DINAS PERHUBUNGAN
			Persentase Peningkatan Penanganan Kemacetan Lalu Lintas	90	DINAS PERHUBUNGAN
4.4		Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,49	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	83	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan yang diperoleh	13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang dapat ditangani	61,5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Indeks Risiko Bencana	180,40	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Persentase Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks	Resiko Bencana	Kabupaten	180,40	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
--	--	--	--------------------------------	--------	----------------	-----------	--------	---

Tabel 4.5
Indikator Makro Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2023	Capian Target
				2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	-	72,77	72,77
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,23	3,25-5,25
3	PDRB per Kapita		32,649	32,96
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	64,61	68,49
5	Indeks Infrastruktur	-	-	33,68
6	Tingkat Kemiskinan	%	11,50	10,67-11,67
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,81	6,50
8	Indeks Gini	-	0,241	0,312
9	Indeks Reformasi Birokrasi	-	na	54,33 (CC)
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	na	60,00 (C)

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4.2.5 Program Inovasi Daerah

Pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bertujuan untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial. Kondisi saat ini permasalahan dan tuntutan kebutuhan masyarakat akan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan inovasi dan terobosan tanpa mengabaikan relasi yang ada sehingga dapat melaksanakan pembangunan daerah melalui inovasi daerah. Inovasi Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:

A. Inovasi Proses Perencanaan Pembangunan

Untuk mengakselerasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah, senantiasa dikembangkan inovasi dari mulai perencanaan hingga pelaporan, pelayanan bagi masyarakat dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Inovasi daerah ini merupakan semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi jenis, prosedur, dan metoda pelayanan publik. Kabupaten Tapanuli Tengah berkomitmen melakukan inovasi di bidang pelayanan masyarakat serta memudahkan bagi pelaku UMKM dan pelaku ekonomi di bidang komoditas unggulan.

Gambar 4.1
Gambaran Pelayanan di DPMPSTP Kabupaten Tapanuli Tengah



Sumber: DPMPSTP Kab. Tapanuli Tengah

Pelayanan publik yang terpadu merupakan landasan pembangunan yang kokoh yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien. Di masa pandemi Covid-19 ini, pelayanan publik masih berjalan dengan memerhatikan protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah pusat. Namun pelayanan ini terbatas dan menyulitkan beberapa masyarakat yang tinggal di pelosok Kabupaten Tapanuli Tengah. Oleh karena itu diperlukan inovasi pelayanan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal-hal yang dilakukan antara lain pelayanan kependudukan selain di hari kerja juga dilakukan di hari Sabtu; adanya integrasi pelayanan berbasis teknologi yang memudahkan masyarakat pelosok untuk melakukan pelayanan secara online yang mudah diakses dan menambah unsur kenyamanan dalam pelayanan.

Gambar 4.2
Inovasi bagi pelaku UMKM di Kabupaten Tapanuli Tengah



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM

Selain di bidang pelayanan publik, UMKM menjadi salah satu bidang yang untuk dilakukannya inovasi terutama UMKM yang mengembangkan produk unggulan daerah. Inovasi yang dilakukan dengan mengikuti Ekspo produk unggulan daerah dengan penyelenggaraan pameran tingkat lokal maupun keikutsertaan dalam ajang pameran tingkat regional (provinsi Sumatera Utara) dan nasional. Inovasi di bidang UMKM lainnya adalah dengan mengembangkan sektor ekonomi kreatif melalui pengembangan kreasi intelektual (knowledge based economy) seperti barang seni atau kerajinan, fashion, fotografi, periklanan, film pendek, dan sebagainya. Serta pengembangan UMKM berbasis teknologi digital melalui pelatihan bisnis online agar produk UMKM dapat dikenal banyak kalangan.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang didasarkan pada kebutuhan dan dinamika yang berkembang pada tahun berjalan. Implementasi berbagai program maupun kegiatan yang bersifat prioritas tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan tidak mengabaikan kepentingan pembangunan yang prioritas. Selanjutnya, prioritas pembangunan daerah disinkronisasikan berdasarkan evaluasi pembangunan dan capaian dalam RPD serta isu strategis.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2024 menjadi acuan untuk penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2024 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan P.APBD Tahun 2024 dilanjutkan dengan Nota Kesepahaman Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kepala Daerah sebagai stimulus pedoman penyusunan RKA Perubahan-OPD. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) untuk tahun 2024 disusun mengacu pada RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026.

Berdasarkan permasalahan pembangunan, isu strategis dan tema pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah, maka dirumuskan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 adalah :

1. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik**
2. **Peningkatan kualitas dan aksesibilitas fasilitas Pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM**
3. **Peningkatan modal sosial masyarakat Tapanuli Tengah yang religius dan berbudaya**
4. **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah**
5. **Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam rangka mendukung perekonomian dan Pelayanan Dasar.**

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2024 didasari dengan hasil evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dimana hanya ada perubahan pagu anggaran. Tidak ada perubahan program sampai sub kegiatan dari Perangkat Daerah selain daripada perubahan pagu anggaran.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel perubahan dibawah ini terkait dengan perubahan dan sebelum perubahan:

Tabel 5.1
Perubahan dan Sebelum Perubahan OPD

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	PERUBAHAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	DINAS PENDIDIKAN	359.224.498.235	389.503.532.354	30.279.034.119
2	DINAS KESEHATAN	171.112.197.196	195.137.334.870	24.025.137.674
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	69.086.538.000	64.852.137.761	(4.234.400.239)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	65.688.305.357	107.800.860.007	42.112.554.650
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	4.239.179.993	5.481.725.000	1.242.545.007
6	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA	13.906.974.612	13.873.330.779	(33.643.833)
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.830.283.000	4.800.927.758	(29.355.242)
8	DINAS SOSIAL	4.619.666.675	4.270.152.867	(349.513.808)
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.825.084.809	3.231.691.022	406.606.213
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.432.582.840	2.470.552.280	37.969.440
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12.829.146.659	9.318.306.815	(3.510.839.844)
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.465.850.054	7.805.523.101	2.339.673.047
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.571.297.174	5.955.874.900	384.577.726
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	16.067.450.688	15.548.488.088	(518.962.600,)
15	DINAS PERHUBUNGAN	4.215.224.915	4.089.080.138	(126.144.777)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.878.329.103	4.269.631.544	391.302.441,25
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.499.967.932	1.941.599.970	(558.367.962)

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	PERUBAHAN (Rp)
1	2	3	4	5
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	3.613.402.132	3.881.914.071	268.511.9
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	10.127.545.245	8.991.438.145	(1.136.107.100)
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	4.425.639.147	4.894.825.314	469.186.167
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.320.972.510	3.356.351.399	35.378.889
22	DINAS PARIWISATA	3.487.397.576	3.525.555.850	38.158.274
23	DINAS PERTANIAN	12.574.026.983	11.197.172.193	(1.376.854.790)
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.031.674.167	2.965.061.985	(66.612.181,89)
25	DINAS KETENAGAKERJAAN	3.201.588.177	3.334.298.769	132.710.592
26	SEKRETARIAT DAERAH	670.599.984	629.175.958	(41.424.026)
27	SEKRETARIAT DPRD	28.257.390.660	32.118.218.772	3.860.828.112
28	BAPPEDA	7.063.774.568	9.424.539.227	2.360.764.659
29	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	266.317.030.823	243.869.153.476	(22.447.877.347)
30	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.776.773.031	5.958.830.774	1.182.057.743
31	INSPEKTORAT	6.362.046.022	6.881.353.384	519.307.362
32	KECAMATAN PANDAN	12.391.432.856	13.166.865.412	775.432.556
33	KECAMATAN SARUDIK	3.550.795.884	4.087.805.396	537.009.512
34	KECAMATAN TUKKA	3.895.533.576	4.521.854.792	626.321.216
35	KECAMATAN BADIRI	2.245.109.192	2.498.089.692	252.980.500
36	KECAMATAN PINANGSORI	3.635.623.767	3.845.806.890	210.183.123

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	PERUBAHAN (Rp)
1	2	3	4	5
37	KECAMATAN LUMUT	1.578.762.110	1.507.383.055	(71.379.055)
38	KECAMATAN SIBABANGUN	1.856.231.556	2.073.827.468	217.595.912
39	KECAMATAN SUKABANGUN	814.217.699	797.275.952	(16.941.747)
40	KECAMATAN TAPIAN NAULI	2.237.444.269	2.346.547.476	109.103.207
41	KECAMATAN SITAHUIS	1.724.659.205	1.895.937.775	171.278.570
42	KECAMATAN SORKAM	2.777.530.004	2.800.725.500	23.195.496
43	KECAMATAN SORKAM BARAT	1.453.461.322	1.773.756.520	320.295.198
44	KECAMATAN KOLANG	2.171.097.947	2.237.579.340	66.481.393
45	KECAMATAN PASARIBU TOBING	870.342.055	751.963.800	-118.378.255
46	KECAMATAN BARUS	2.532.356.305	2.331.757.281	-200.599.024
47	KECAMATAN SOSORGADONG	1.484.857.794	1.464.140.443	-20.717.351
48	KECAMATAN BARUS UTARA	763.853.000	826.568.964	62.715.964
49	KECAMATAN ANDAM DEWI	1.469.181.457	1.401.761.247	(67.420.210)
50	KECAMATAN SIRANDORUNG	1.682.189.695	1.885.439.720	203.250.025
51	KECAMATAN MANDUAMAS	3.007.712.284	2.652.259.784	(355.452.499)
52	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.352.788.898	39.255.754.500	35.902.965.602
	TOTAL	1.192.473.747.413,79	1.306.726.604.303,00	114.252.856.889,21

Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan tiap perangkat daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat dalam lampiran Bab V Dokumen P-RKPD ini.

Tabel 5.2

Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Pogram Prioritas Pembangunan

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	INSPEKTORAT		
		URUSAN PEMERINTA BIDANG PENGAWASAN		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
		Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
		Review Laporan Kinerja	Terlaksananya Review Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Review Laporan Kinerja
		Review Laporan Keuangan	Terlaksananya Review Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Review Laporan Keuangan

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR
2	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas fasilitas Pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM	DINAS PENDIDIKAN		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP
		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Bantuan Transport Guru Honor dan Penilaian Angka Kredit Guru
		DINAS KESEHATAN		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR
				Bersih dan Sehat
3	Peningkatan modal sosial masyarakat Tapanuli Tengah yang religius dan berbudaya	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Tercapai
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Telaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR
		Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kebudayaan yang pelakunya masyarakat yang telah di kelola
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kesenian Masyarakat yang dibina
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya
4	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	DINAS KOPERASI DAN UKM		

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR
	Daerah			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro
5	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dalam rangka mendukung Pengembangan Ekonomi Pelayanan Dasar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Terlayannya Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		
		Pembangunan Jalan	Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		
		Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
		PRORAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		
		URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN		
		Koordinas dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksana Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Kooordinas dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum Perumahan
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang terverifikasi dari Pengembang

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR
		DINAS PARIWISATA		
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya

Tabel 5.3
Rencana Aksi Prioritas Pembangunan

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	STRATEGI TAG 1	TARGET	LOKASI	PAGU 2024
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	INSPEKTORAT						
		URUSAN PEMERINTA BIDANG PENGAWASAN						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal						
		Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Mengurangi Beban Pengeluaran	80 Laporan	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kel/Desa	144.999.874
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Mengurangi Beban Pengeluaran	36 Laporan	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kel/Desa	141.197.776
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Mengurangi Beban Pengeluaran	4 Laporan	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kel/Desa	46.999.877
		Review Laporan Kinerja	Terlaksananya Review Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Review Laporan Kinerja	Mengurangi Beban Pengeluaran	20 Laporan	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kel/Desa	104.999.990

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	STRATEGI TAG 1	TARGET	LOKASI	PAGU 2024
		Review Laporan Keuangan	Terlaksananya Review Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Review Laporan Keuangan	Mengurangi Beban Pengeluaran	8 Laporan	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kel/Desa	54.999.768
2	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas fasilitas Pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM	DINAS PENDIDIKAN						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Mengurangi Beban Pengeluaran	321 Satuan Pendidikan	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kel/Desa	33.734.600.000
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Mengurangi Beban Pengeluaran	78 Satuan Pendidikan	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kel/Desa	20.155.200.000
		Pengelolaan Pendidikan						

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	STRATEGI TAG 1	TARGET	LOKASI	PAGU 2024
		Anak Usia Dini (PAUD)						
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Mengurangi Beban Pengeluaran	360 Satuan Pendidikan	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kel/Desa	3.532.200.000
		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan						
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Mengurangi Beban Pengeluaran	3 Orang	Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	349.200.000
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Mengurangi Beban Pengeluaran	10 Satuan Pendidikan	Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	309.430.000
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	STRATEGI TAG 1	TARGET	LOKASI	PAGU 2024
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Bantuan Transport Guru Honor dan Penilaian Angka Kredit Guru	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1 Dokumen	Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	2.530.000.000
		DINAS KESEHATAN						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Mengurangi Beban Pengeluaran	9676 Orang	Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	1.534.154.072

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	STRATEGI TAG 1	TARGET	LOKASI	PAGU 2024
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Mengurangi Beban Pengeluaran	9236 Orang	Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	324.392.380
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Mengurangi Beban Pengeluaran	8796 Orang	Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	174.777.081
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Mengurangi Beban Pengeluaran	42268 Orang	Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	191.815.831
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Mengurangi Beban Pengeluaran	80625 Orang	Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	1.082.448.470
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Mengurangi Beban Pengeluaran	246442 Orang	Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	100.562.322

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	STRATEGI TAG 1	TARGET	LOKASI	PAGU 2024
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Mengurangi Beban Pengeluaran	40664 Orang	Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	170.985.663
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Mengurangi Beban Pengeluaran	576 Orang	Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	169.849.749
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Mengurangi Beban Pengeluaran	8213 Orang	Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	942.873.034
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Mengurangi Beban Pengeluaran	6195 Orang	Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	307.861.292
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Mengurangi Beban Pengeluaran	1 Dokumen	Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	6.964.084.497

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	STRATEGI TAG 1	TARGET	LOKASI	PAGU 2024
				Masyarakat				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	1 Dokumen	Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	1.504.104.733
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	1 orang	Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	201.000.495
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	1 Dokumen	Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	38.152.787.253
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	STRATEGI TAG 1	TARGET	LOKASI	PAGU 2024
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1 Dokumen	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	170.466.425
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Mengurangi Beban Pengeluaran	1 Dokumen	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	100.001.853
3	Peningkatan modal sosial masyarakat Tapanuli Tengah yang religius dan berbudaya	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	STRATEGI TAG 1	TARGET	LOKASI	PAGU 2024
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Tercapa		100%	Kabupaten Tapanuli Tengah	188.018.000
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Telaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		500 orang	Kabupaten Tapanuli Tengah	95.987.600
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi		Persentase Stabilitas Keamanan dan Ketertiban		100%	Kabupaten Tapanuli Tengah	30.000.000

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	STRATEGI TAG 1	TARGET	LOKASI	PAGU 2024
		Kemasyarakatan						
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		500 org	Kabupaten Tapanuli Tengah	30.000.000
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kebudayaan yang pelakunya masyarakat yang telah di kelola		1 objek	Kabupaten Tapanuli Tengah	599.932.785
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan,		15 Objek	Kabupaten Tapanuli Tengah	499.970.785

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	STRATEGI TAG 1	TARGET	LOKASI	PAGU 2024
				Pemanfaatan				
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		30 Orang	Kabupaten Tapanuli Tengah	99.961.986
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kesenian Masyarakat yang dibina		2 objek	Kabupaten Tapanuli Tengah	399.997.459
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan		10 Orang	Kabupaten Tapanuli Tengah	249.999.959
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya		10 Lembaga	Kabupaten Tapanuli Tengah	149.997.500

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	STRATEGI TAG 1	TARGET	LOKASI	PAGU 2024
4	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	DINAS KOPERASI DAN UKM						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Meningkatkan Pendapatan	1 unit	Kab. Tapanuli Tengah, Kecamatan Pandan	12.871.489
5	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dalam rangka mendukung Pengembangan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	STRATEGI TAG 1	TARGET	LOKASI	PAGU 2024
	Ekonomi Pelayanan Dasar							
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	4,5 KM	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	7.477.755.753
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1147 liter/detik	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	15.654.973.768

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	STRATEGI TAG 1	TARGET	LOKASI	PAGU 2024
				Masyarakat				
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Terlayannya Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	250 M3/hari	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	6.848.805.868
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						
		Pembangunan Jalan	Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	3 KM	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	26.545.580.250
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	2 KM	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	1.133.230.986
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN						

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	STRATEGI TAG 1	TARGET	LOKASI	PAGU 2024
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						
		Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1 Laporan	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	534.190.846
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1 Laporan		23.837.386

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	STRATEGI TAG 1	TARGET	LOKASI	PAGU 2024
		PRORAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						
		URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN						
		Koordinas dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksana Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Kooordinas dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum Perumahan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1 Laporan	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	29.310.248
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang terverifikasi dari Pengembang	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1 Laporan	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	39.752.806
		DINAS PARIWISATA						

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	STRATEGI TAG 1	TARGET	LOKASI	PAGU 2024
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	3 Laporan	Kab. Tapanuli Tengah, Kec. Tukka, Desa Sait Kalangan Dua, Kab. Tapnuli Tengah, Kec. Sosorgadong, Desa Barambang	649.999.834
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Meningkatkan Pendapatan	20 Orang	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan	165.000.000

BAB VI

P E N U T U P

Perubahan RKPD menjadi pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah, Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan daerah juga menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah.

Perubahan RKPD Tahun 2024 memiliki peran yang penting yaitu menjadi dasar bagi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selain itu, Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada pembangunan Tahun 2024 sepenuhnya atas sinergitas jajaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Masyarakat dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendukung terwujud pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang lebih baik. Keterlibatan dan komitmen seluruh Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan prioritas yang telah disusun dalam dokumen P-RKPD Tahun 2024 menjadi hal yang penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan yang telah direncanakan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH

SUGENG RIYANTA